



PUTUSAN

Nomor 1236/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INDO SEPADAN JAYA, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2993/PJ./2015, tanggal 31 Agustus 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61342/PP/M.XVI.A/13/2015, tanggal 06 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 1769/JKT/ISJ-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

1. bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 untuk Tahun Pajak 2002 yang Pemohon Banding terima tanggal 17 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut:

- Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 7.507.951.356
- Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 3.603.816.651
- Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 11.111.768.007

dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

2. bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 1279/JKT/ISJ-KPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2013;

3. bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah ("Kanwil") Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak			
Pajak Penghasilan(PPH) Terutang			
Kredit Pajak			
PPH Kurang/(lebih) Bayar	7.507.951.356	-	7.507.951.356
Sanksi Administrasi	3.603.816.651	-	3.603.816.651
Jumlah PPh ymh/(lebih)dibayar	11.111.768.007	-	11.111.768.007

4. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dengan ini Pemohon Banding:

- a. Mengajukan Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
- c. Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan



jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan yaitu tanggal 04 November 2013;

5. bahwa untuk syarat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2005 mengenai pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pembayaran lebih dari 50% atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yaitu sebesar Rp5.556.884.004,00 (Rp5.555.884.004,00 + Rp1.000.000,00) dengan copy SSP terlampir pada Lampiran Nomor 3 sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp5.555.884.004,00 pada tanggal 20 Juni 2013;
 - b. sebesar Rp1.000.000,00 pada tanggal 14 November 2013;

PERMOHONAN BANDING

1 Pokok Sengketa Banding

bahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak memuat perincian perhitungan pajak kurang dibayar;

bahwa berdasarkan alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas, maka Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dengan alasan-alasan dan penjelasan-penjelasan sebagai berikut:

Koreksi atas pajak kurang dibayar sebesar Rp7.507.951.356,00

Menurut Terbanding (d/h Pemeriksa dan Penelaah Keberatan)

bahwa Terbanding di dalam proses pemeriksaan pajak menetapkan pajak kurang dibayar sebesar Rp7.507.951.356,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp3.603.816.651,00 sehingga menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp11.111.768.007,00 dengan alasan bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012;

bahwa Terbanding di dalam proses penelitian Keberatan mempertahankan Pajak yang tidak/kurang dibayar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak yang tidak/kurang dibayar dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.



2. Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 yang diterbitkan dimana Terbanding menggunakan alasan dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239KJPID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayar sebesar Rp7.507.951.356,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp3.603.816.651,00, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp11.111.768.007,00, dengan alasan-alasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan bahwa: *"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:*
 - a. *apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;*
 - b. *apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;*
 - c. *apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);*
 - d. *apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang";*



Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa: *"Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana, karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengatur bahwa *"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Verifikasi terhadap keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang";*

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (3) dari peraturan perpajakan yang sama mengatur bahwa *"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.";*

Bahwa Berdasarkan peraturan di atas, maka dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah sangat tidak tepat dan tidak memiliki dasar karena putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan terhadap Saudara Suwir Laut bukan terhadap PT Indo Sepadan Jaya. Dengan demikian pihak Terbanding tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012



tersebut PT Indo Sepadan Jaya bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

2. Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa *“Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *Verifikasi dilakukan oleh petugas verifikasi;*
 - b. *Petugas verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan verifikasi;*
 - c. *Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan verifikasi;*
 - d. *petugas verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
 - e. *pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;*
 - f. *dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada petugas verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
 - g. *berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;*
 - h. *dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka*



Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- i. berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
- j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;*
- k. berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
- l. hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi;*
- m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf 1 dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi”;*

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- Pemohon Banding menerima Surat Tugas Nomor ST-548/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 19 April 2013;
- Pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S-S-7081/WPJ.06/KP.12/2013;



- Dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi kepada Pemohon Banding;
 - Dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir;
 - Dengan demikian, maka kewajiban Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi;
3. Pasal 16 huruf b poin 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa *"Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf 1 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:*
- 1) *penugasan Verifikasi;*
 - 2) *identitas Wajib Pajak;*
 - 3) *pemenuhan kewajiban perpajakan;*
 - 4) *data/informasi yang tersedia;*
 - 5) *materi yang diverifikasi;*
 - 6) *uraian hasil Verifikasi;*
 - 7) *pengujian yang telah dilakukan;*
 - 8) *penghitungan pajak terutang; dan*
 - 9) *simpulan dan usul petugas Verifikasi";*
- bahwa dalam surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S-7081/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses verifikasi;
4. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi: *"Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan*



secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.", pada tanggal 03 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 702/JKT/ISJ-KPPMTONI/13 tanggal 28 Juni 2013 sehubungan dengan Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat;

bahwa melalui surat Nomor S-9992/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menjawab surat permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, namun dalam surat jawaban Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat menyampaikan hal sebagai berikut:

- bahwa dasar penerbitan SKPKB Nomor 00004/204/02/073/13 sudah kami sampaikan sebelumnya dalam surat S-7081/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- bahwa atas pemberitahuan hasil verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, S.E. pada tanggal 16 Mei 2013.

bahwa sehubungan dengan Penjelasan tersebut di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa selama proses pembahasan sebagaimana dimaksud di atas Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku Waiib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan;

5. Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali surat Nomor 1012/JKT/ISJ-KPPMTON11/13 tanggal 25 Juli 2013 sehubungan dengan tanggapan atas surat S-9992/WPJ.06/KP.12/2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat di mana sampai saat Pemohon Banding menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Banding masih belum menerima jawaban dan pihak Terbanding;



6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dilakukan tanpa melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Walib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dimana alasan koreksi dan penerbitan SKPKB ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;
7. Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor S-2506/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 dituliskan “sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-764/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 2 September 2013 dan Surat Tugas Nomor ST-803/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 16 September 2013”;
Bahwa perlu Pemohon Banding beritahukan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima Surat Tugas dalam rangka Penelitian Keberatan dengan Nomor tersebut sejak Surat Keberatan Nomor 1279/JKT/ISJ-KPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang Pemohon Banding laporkan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan surat tanggapan atas SPUH dan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor 1468/JKT/ISJ-KWLDJP/X/13 tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon Banding sampaikan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 bahwa: *“Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:*
 - a. *meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;*
 - b. *meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan”;*



bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi ataupun surat permintaan keterangan dari Direktur Jenderal Pajak selama proses keberatan sejak pelaporan surat keberatan pada tanggal 20 Agustus 2013 sampai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-2506/WPJ.06/BD.06/2013 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 Oktober 2013;

9. Bahwa mengutip SPUH Nomor S-2506/WPJ.06/BD.06/2013 tertanggal 9 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa "mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data ...";

Bahwa tanggapan Pemohon Banding adalah bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima formulir yang dimaksudkan dalam SPUH dengan Nomor tersebut di atas. Pemohon Banding juga tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum surat keberatan disampaikan. Dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding;

10. Bahwa pada tanggal 07 November 2013, Pemohon Banding menyampaikan kembali surat Nomor 1595/JKT/ISJ-KWLDJP/XI/13 tertanggal 04 November 2013 Perihal Permohonan Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Pusat, yang selanjutnya dijawab oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan surat Nomor S2960/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 27 November 2013 namun demikian di dalam surat tersebut tetap tidak dijelaskan mengenai dasar pengenaan pajak (alasan dasar penerbitan) Surat Keputusan Keberatan/Surat Ketetapan Pajak beserta dengan perincian perhitungan koreksi yang dilakukan;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013



tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp7.507.951.356 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp3.603.816.651 dilakukan tanpa melalui proses keberatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan PerPajakan yang berlaku, tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hash Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudah sangat ielas tidak dapat diadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan penagihan naik dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihak yang didakwa/bersengketa;

12. Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan dan fakta-fakta yang terjadi sebagaimana telah Pemohon Banding jelaskan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim agar jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp7.507.951.356 ditambah dengan sanksi administrasi sebesar Rp3.603.816.651 sehingga jumlah PPh Pasal 26 yang masih hams dibayar sebesar Rp11.111.768.007 menurut Terbanding, seharusnya dibatalkan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak NIHIL;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan Permohonan Banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 mengenai Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor 00004/204/02/073/13 tertanggal 23 Mei 2013, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut berikut dengan dasar penerbitan SKPKB di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus dibatalkan;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk tahun pajak 2002 adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp	-
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang	Rp	-
- Kredit Pajak	<u>Rp</u>	-
- PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	-
- Sanksi Administrasi	<u>Rp</u>	-



- Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61342/PP/M.XVI.A/13/2015, tanggal 06 Mei 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013, atas nama: PT.Indo Sepadan Jaya, NPWP: 01.221.933.3-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2, Kebon Melati, Jakarta Pusat 10230;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61342/PP/M.XVI.A/13/2015, tanggal 06 Mei 2015, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 29 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Duduk Perkara (*Fundamentum Petendi*) Pengajuan Memori Peninjauan Kembali



Bahwa duduk perkara (*fundamentum petendi*) dari permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dijelaskan melalui kronologis sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Mei 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Madya Jakarta Pusat menerbitkan SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00004/204/02/073/13 untuk Tahun Pajak 2002 yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terima tanggal 17 Juni 2013 dengan perincian hanya sebagai berikut:
 - a. Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 7.507.951.356,00
 - b. Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 3.603.816.651,00
 - c. Jumlah PPh Yang Masih Harus Dibaya Rp 11.111.768.007,00Dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012. Padahal dalam perkara pidana tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang didakwa;
2. Selanjutnya, atas SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Keberatan melalui Surat Nomor 1279/JKT/ISJ-KPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2013;
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengirimkan Surat Nomor 702/JKT/ISJ-KPPMTO/VI/13 tanggal 28 Juni 2013 kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yang meminta keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Namun oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Nomor S-9992/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menjawab surat permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, namun dalam surat jawaban penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KPP Madya Jakarta Pusat hanya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun 2002 sudah kami sampaikan sebelumnya dalam surat Nomor S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7081/WPJ.06/KP.12/2032 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi;

- Bahwa atas Pemberitahuan Hasil Verifikasi tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S Gunawan, S.E., pada tanggal 16 Mei 2013;
- 4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan kembali Surat Nomor 1012/JKT/ISJ-KPPMTO/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 Perihal tanggapan atas surat S-9992/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 mengenai Penjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 kepada KPP Madya Jakarta Pusat dimana sampai saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih belum menerima jawaban dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Kantor Wilayah ("Kanwil") Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") Jakarta Pusat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 yang menetapkan menolak Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
a. Penghasilan Netto			
b. Kompensasi Kerugian			
c. Penghasilan Kena Pajak			
d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang			
e. Kredit Pajak			
f. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	7,507,951,356	-	7,507,951,356
g. Sanksi Administrasi	3,603,816,651	-	3,603,816,651
h. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	11,111,768,007	-	11,111,768,007

- 6. Melalui Surat Nomor 1769/JKT/ISJ-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- 7. Berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dengan alasan sebagai berikut:

1. Kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan penerbitan SKPKB PPH Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 secara formal dan materi, sehingga SKPKB dengan Nomor tersebut berikut dengan KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:
 - a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukan Terbanding;
 - b. Tidak terdapat pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi yang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHV dan Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak dan asal usulnya;
 - d. Terbanding telah menerbitkan SKPKB *a quo* tanpa memperhatikan prosedur tata cara verifikasi pajak yang berlaku;
 - e. Hilangnya hak Pemohon Banding dalam melakukan pengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupun pemungutan yang telah dipotong dan disetor;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah perkara/kasus hukum Saudara Suwir Laut, bukan kasus hukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding bukan pihak yang di dakwa). Saudara Suwir Laut bukan merupakan pengurus dan kuasa dari Direksi yang dapat mewakili perusahaan dalam hal ini PT Indo Sepadan Jaya (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) sebagaimana yang dimaksud Pasal 32 UU KUP *juncto* Pasal 2 UU KUP *juncto* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dalam Surat Uraian Banding menyatakan perlu dilakukan penelitian terhadap kewenangan Bukit Sanjaya selaku Direktur dalam

Halaman 16 dari 129 halaman. Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Banding, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang mewakili suatu perseroan haruslah pihak yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga secara Hukum Pajak (hukum administrasi) Putusan tersebut hanyalah sebagai data yang harus diolah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui proses pemeriksaan pajak dan verifikasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Indo Sepadan Jaya, Saudara Suwir Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PT Indo Sepadan Jaya (Pemohon Banding) sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPKB terhadap Pemohon Banding;
4. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tidak menyebutkan PT Indo Sepadan Jaya (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) merupakan Wajib Pajak yang dipidana juga bukan merupakan pihak yang didakwa dan diberikan kesempatan untuk membela diri di dalam persidangan kasus saudara Suwir laut dan tidak terdapat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan pajak terutang dan dendanya;
5. Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah khilaf dan menunjukkan kekeliruan yang nyata karena:
 - a. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengutip kutipan berikut ini:

“Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika



pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)- Taverne”

Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof. Andi Hamzah, sebagai berikut:

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Gerechtshof). Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan: “menimbang, dan seterusnya ... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa Judex Facti tetapi hanya judex juris, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah Judex Facti.”;

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof. Andi Hamzah, S.H. pada buku E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, 2012, halaman ix-x.);

- b. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut, PT Indo Sepadan Jaya bukan merupakan pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

- c. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan PT Indo Sepadan Jaya tidak pernah dijadikan Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2011, JPU



hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan PT Indo Sepadan Jaya sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya;

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan PT Indo Sepadan Jaya sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam amar putusannya justru menyatakan sebagai berikut:

“Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing:”;

- d. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

”3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;

4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”;

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata “harus” pada kalimat “Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Perlu dicermati bahwa terdapat kata “dan” di antara kalimat “harus didasarkan atas surat dakwaan” dengan kalimat “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang berarti keduanya harus terpenuhi;



Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan;

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan"* Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, hal.389, menyatakan bahwa:

"Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan "landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa". Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya."

Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan;

Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam artikelnya "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", yang dimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 Nomor 7 Tahun 2003, halaman 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum,



sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen;

Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Pustaka Ilmu, 2012, halaman 121-123 menyatakan sebagai berikut:

"Dilihat dari aspek prosedural "surat dakwaan" memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya";

Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul "Pembuktian Dalam Hukum Pidana", Pustaka Ilmu, 2012, halaman 57-58 menyatakan sebagai berikut:

Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1. Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim;

2. Sisi kepentingan Hakim

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi (pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya;

3. Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai



dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya;

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”;

Suatu penghukuman yang melibatkan subjek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum, yaitu *due process of law*;

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., L.L.M, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:

- a. pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp2,7 triliun kepada PT AA.

Apakah Putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip due process of law.”;

- b. pada artikel “Putusan MA Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013,



menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi error in persona atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.

Romli menambahkan, Putusan MA tersebut non executable atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan Putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”;

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”;

e. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Polttik), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan



kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayainya;
 - (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan



syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

(f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;

(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.

6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara;

f. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Po) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko:

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHAP karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di



hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan;

(Sumber: <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhap>);

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHAP.

(Sumber:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4bafc3/hakim-lampau-i-kewenangan--putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>);

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin.”

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”;

(Sumber:<http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelikung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>);

6. Bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*);

7. Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Indo Sepadan Jaya dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus (Bukti-P11) yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a, b, c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang



berwenang menyuruh menjalankan putusan-dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. *Vide* Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, S.H., halaman 64;

Dengan demikian, pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*);

8. Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Peraturan pelaksanaannya, yang harus memberikan Hak bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang



merupakan kewajiban bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan bukti-bukti hukum maupun proses pemeriksaan pajak dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sehingga SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang diterbitkan seharusnya dinyatakan Cacat Hukum sehingga harus batal demi Hukum. Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 Tertanggal 31 Oktober 2013 otomatis Cacat hukum dan harus Batal demi Hukum;

8. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga perhitungan PPh Pasal 26 seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut:

• Penghasilan Netto	Rp	-
• Kompensasi Kerugian	<u>Rp</u>	-
• Penghasilan Kena Pajak	Rp	-
• Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	Rp	-
• Kredit Pajak	<u>Rp</u>	-
• PPh Kurang/(Lebih) bayar	Rp	-
• Sanksi Administrasi	<u>Rp</u>	-
• Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	NIHIL

II. Tentang Pokok Sengketa Yang Diajukan Peninjauan Kembali

Sebelum membahas satu-persatu terhadap pokok sengketa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memandang perlu mengemukakan dalil umum dan berbagai prinsip hukum dalam penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak sebagai berikut:

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang



melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak;

Dalam penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dijelaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Catatan: Kekuasaan Kehakiman terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang *mandiri* dan merdeka;

- b. Hukum Pajak mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yang tergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara Pengadilan Pajak menganut asas keaktifan hakim (*Dominus Litis*) yang tercermin dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";

Karena itu Pengadilan Pajak juga harus menegakkan kebenaran dan keadilan materil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.";

- c. Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*) tersebut, juga sejalan dan sangat terkait dengan:

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.";

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut:



“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

- d. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena karakteristiknya sebagai hukum yang berada dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, dan sesuai asas Keaktifan Hakim maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan meneliti sengketa adalah sangat penting untuk menentukan objek yang harus dibuktikan, subjek (pihak) yang dibebani kewajiban pembuktian dan menilai pembuktian yang dilakukan dalam hal ini termasuk menguji atau menimbang tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tentang ada atau tidaknya kewenangan untuk bertindak, dan apabila kewenangan itu memang ada, maka perlu diuji/dinilai apakah tindakannya berdasar dan mengikuti tata cara/prosedur (kewenangan yang terukur) dan apabila harus dilakukan berdasar diskresi (kewenangan tidak terukur) maka apakah tindakan tersebut telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *fair play*, asas kepastian hukum dan asas larangan *“détournement de procedure”*;

- e. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Putusan Hakim harus disertai alasan dan dasar dari putusan tersebut (*Motiveringsplicht*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

- f. *Motiveringsplicht* (alasan dan dasar dari putusan Hakim tersebut) juga merupakan prinsip penting dalam pengambilan putusan di Pengadilan Pajak sebagaimana nampak pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84 ayat (1)

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- a. *kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;*
- b. *nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;*
- c. *nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;*



- d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
- e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang jelas;
- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. pokok sengketa;
- h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- i. amar putusan tentang sengketa; dan
- j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”

Pasal 84 ayat (2)

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.”;

g. Asas Kesamaan (*Audi et Alteram Partem*)

Dalam proses persidangan, sebagai salah satu implementasi bahwa Hakim harus bersikap mandiri/tidak memihak adalah dengan menerapkan asas kesamaan (*Audi et Alteram Partem*) yang artinya para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, ada keseimbangan profesional dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim dalam mengambil putusan tidak boleh hanya berdasarkan keyakinannya tetapi harus meneliti dan mempertimbangkan dalil-dalil dan alat-alat bukti dari pihak-pihak yang berperkara;

h. Asas Objektivitas

Asas ini tercermin dalam Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 yang pada prinsipnya “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Itu sebabnya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.”;

VII. Pembahasan Pokok Sengketa

Sehubungan dengan penjelasan/dalil-dalil umum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas berikut ini akan dibahas secara rinci untuk membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Pajak



a quo nyata-nyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukumnya dan karena itu menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) sehingga sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2002 yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 yang menggunakan alasan “dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012” dan dengan dasar Pasal 13 ayat (5) UU KUP;
2. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut benar-benar sangat sewenang-wenang, tidak wajar, tidak cermat, keliru dan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *fair play*, asas kepastian dan asas larangan “*detournement de procedure* karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Oleh sebab itu, diajukan Banding dengan Surat Nomor 1769/JKT/ISJ-PP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 17 Desember 2013 dengan kesimpulan selama proses persidangan banding di Pengadilan Pajak sebagai berikut:

No.	Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
1	<p>Bahwa sesuai SUB halaman 2 butir 3 a bahwa Permohonan Banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (“UU KUP”);</p> <p>Bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diproses berdasarkan Pasal 26 UU KUP;</p> <p>Bahwa Keputusan Keberatan</p>	<p>Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: <i>“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25”</i></p> <p>Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: <i>“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan</i></p>



<p>Jo. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah diproses sesuai UU KUP tersebut bukan merupakan objek sengketa banding sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memohon kepada Pengadilan Pajak untuk tidak memproses Permohonan Banding tersebut;</p>	<p><i>peradilan tata usaha Negara.”</i></p> <p>Bahwa sudah sangat jelas dari bunyi Pasal tersebut di atas dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara;</p> <p>Bahwa penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 <i>juncto</i> Pasal 25 <i>juncto</i> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hanya mengenal 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara *Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk deferensiasi dan spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (*<i>Vide</i> Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dikutip dari Laporan Penelitian “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011). (Catatan dikenal dengan asas <i>lex specialis derogat lex generalis</i>”);</p> <p>Laporan Penelitian “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, pada halaman 173 juga mengutip pendapat Djafar Saidi yang mengemukakan bahwa sengketa Pajak bukan merupakan sengketa tata usaha negara dapat diketahui pula dari substansi pengertian sengketa tata usaha negara.</p> <p>Bahwa selain itu, sesuai dengan asas <i>lex posteriori derogat lex anteriori</i>, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Mengenai Pengadilan Pajak terbit lebih akhir daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (<i>Vide</i> Tim Kompendium Bidang Hukum Tentang Lembaga</p>
---	--



	<p>Penyelesaian Sengketa Perpajakan Tahun 2011);</p> <p>Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP), termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (<i>Vide</i> Pasal 31 <i>juncto</i> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002).</p> <p>Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.”</i></p> <p>Bahwa dalam hal ini Keputusan Keberatan secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menolak permohonan keberatan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 26 UU KUP dengan demikian Keputusan Keberatan dengan Nomor tersebut, ruang lingkup pengaturannya bukan berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;</p> <p>Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB <i>a quo</i> berdasarkan Pasal 25 UU KUP dimana secara tegas di dalam Surat Keputusannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan</p>
--	---



bahwa Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dan memenuhi ketentuan di dalam Pasal 25 UU KUP sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah melaksanakan proses penelitian keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut yang menghasilkan Keputusan Keberatan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP dan bukan TDD/Tidak Dapat Diproses;

Oleh karena itu, pada hakekatnya sengketa ini merupakan sengketa dibidang perpajakan yang merupakan domain atau ranah hukum pajak yang sengketanya selanjutnya menjadi kompetensi Pengadilan Pajak untuk mengadili sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 2 huruf e UU PTUN dari Majelis Pengadilan Pajak adalah tidak tepat. Keputusan Keberatan yang diproses sesuai dengan pasal 26 UU KUP ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKB *a quo* sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi semua ketentuan Pasal Pengajuan Keberatan tersebut di dalam UU KUP. Sehingga sesuai dengan Pasal 27 UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan permohonan banding atas Keputusan Keberatan yang diproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanya pengecualian untuk keputusan keberatan yang dapat diajukan banding. Terlebih lagi seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan keputusan keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB tanggal 19 Maret 2014 halaman 2 butir 3a juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa banding telah sesuai dengan ketentuan dan bisa diproses di Pengadilan Pajak; Namun masih perlu



	<p>penelitian lebih lanjut permenuhan Pasal 32 UU KUP dan Pasal 36 ayat (4) UU PP.</p> <p>Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak. Sehingga apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengatakan bahwa Keputusan Keberatan yang mereka terbitkan atas dasar Pasal 26 UU KUP tidak dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, maka hal ini menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) itu sendiri dan sangat tidak memiliki dasar hukum sama sekali;</p> <p>Bahwa Lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas Keputusan Keberatan yang telah diproses dengan UU KUP dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pengajuan Banding ini adalah atas perkara yang mengandung sengketa pajak karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan adalah mengenai Keputusan Keberatan yang mengandung nilai sengketa pajak; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa <i>azas lex specialis derogat lex generalis</i> harus di aplikasikan dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum yang sifatnya <i>generalis</i> sehingga dalam sengketa ini yang harus diterapkan Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai <i>lex specialis</i>. Sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk tidak melanjutkan proses Pengajuan Banding ini dan seharusnya memeriksa dan mengadili sengketa ini;</p> <p>Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan (tidak mengandung nilai sengketa) bukan Banding (mengandung nilai sengketa). Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa</p>
--	---



	<p>permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding;</p> <p>Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa Pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tempuh merupakan prosedur yang lazim ada dan memang diatur dalam proses pemeriksaan dan keberatan berdasarkan UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak.</p> <p>Bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc pada butir 11 halaman 12 (Bukti-P04) bahwa: <i>"Pengadilan Pajak adalah merupakan badan peradilan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyatakan bahwa badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang....Oleh karena sifatnya yang khusus, maka hal ini merupakan hukum pidana fiscal (fiscal strafrecht) yang berkaitan dengan hal pajak...Meski dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi Undang-Undang PTUN tidak dapat dikatakan mengikat dalam perkara Pajak, karena dalam perkara Pajak berlaku Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak";</i></p> <p>Bahwa dengan demikian putusan pidana Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tidaklah termasuk dalam ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut karena masih terdapat sengketa mengenai besarnya pajak terutang yang tidak pernah disampaikan kepada Perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan harus berlaku undang-undang perpajakan dan Undang-</p>
--	---



Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa lebih lanjut oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan yang tidak dapat disengketakan telah diatur secara khusus dalam Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan, yaitu melalui Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (*lex specialis*) yaitu sebagai berikut:

1. Surat Pelaksanaan Putusan Banding yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Banding;
2. Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Peninjauan Kembali;
3. Surat Pelaksanaan Putusan Gugatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah menerima Putusan Gugatan;

maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Tata Usaha Negara sebagai ketentuan yang berlaku secara umum (*lex generalis*), tidak dapat digunakan sebagai dasar argumentasi dalam perkara di bidang perpajakan *a quo*. Dengan demikian, SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam perkara *a quo* yang pengajuan keberatannya diputus dengan keberatan *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga jelas Keputusan Keberatan atas SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan Sebagai Tindak Lanjut dari Putusan Badan Peradilan tersebut merupakan Objek yang dapat diajukan Banding sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan. Hal ini diperkuat dengan adanya kajian mengenai "Apakah Keputusan Keberatan Atas SKPKB dan SKPKBT yang Diterbitkan dari Putusan Badan Peradilan Merupakan Objek Yang Dapat Diajukan Banding Sebagaimana Diatur Dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak" oleh Bapak Eddy Mangkuprawira, S.H., M.Si (Bukti-P08);

Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, bahwa yang termasuk di dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung nilai sengketa dimana SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung nilai sengketa pajak yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Pengadilan Pajak ini yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak terutang, pajak kurang dibayar dan sanksi administrasinya dan karena Pengadilan Pajak



		<p>merupakan pengadilan khusus di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah seharusnya Undang-Undang Pengadilan Pajak yang harus diterapkan;</p> <p>Bahwa dengan demikian Pasal 2 huruf e jelas tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;</p>
2	Pasal 13 ayat (5) UU KUP sebagai amanat menerbitkan SKPKB.	<p>Pasal 13 ayat (5) UU KUP berbunyi sebagai berikut: <i>“Apabila jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu sepuluh tahun tersebut dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”</i></p> <p>Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU KUP berbunyi: <i>“Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui. Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiskal yang selama itu sengaja tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak”;</i></p> <p>Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan Negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak.</p> <p>Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak.</p> <p>Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana</p>



		<p>karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.</p> <p>Dalam Penjelasan tersebut telah sejelas-jelasnya dijelaskan bahwa penerbitan SKPKB yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya yang diajukan ke pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) tersebut adalah sesuai dengan prinsip <i>Ultimum Remedium</i>.</p>
3	<p>Bahwa di dalam penjelasan tertulis yang disampaikan ke Pengadilan Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengutip pendapat R. Wiyono SH dan Indroharto dan berkesimpulan bahwa SKPKB yang diterbitkan tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan atas penerbitannya tidak dapat disengketakan lagi;</p>	<p>Bahwa pendapat dan kesimpulan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas keliru, dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>“a. Yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan badan peradilan dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 huruf e tersebut adalah hasil pemeriksaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu Mahkamah Agung... b. jika yang dipergunakan sebagai dasar <i>dikeluarkannya Keputusan Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat berasal atau diambil dari 1) pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 2) amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap</i>”;</p> <p>Bahwa sudah sangat jelas bahwa menurut kutipan pendapat R. Wiyono SH yang dipakai oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Putusan harus diambil dari pertimbangan hukum atau amar putusan, dan terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menggunakan amar pertimbangan dari Putusan Mahkamah Agung halaman 472 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana</i></p>



		<p><i>korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan”;</i></p> <p>Bahwa mengutip Pendapat dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di butir 2 halaman 2 di dalam Pendapat hukum beliau (Bukti-P04) dan yang berbunyi:</p> <p><i>“Dalam pertimbangan putusan di atas terdapat keraguan yang beralasan bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan doktrin “vicarious liability” pada kasus dengan Terpidana Suwir Laut. Meskipun dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menerapkan doktrin “vicarious liability” dengan alasan bahwa perbuatan Terpidana merupakan “mensrea” dari 14 Perusahaan Asian Agri Group, akan tetapi kasus ini merupakan ranah hukum pidana yang menganut asas legalitas sebagai tiang utama demi menjamin kepastian hukum dan tidak mengenal metode penuntutan terhadap badan hukum sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab. Sehingga menurut saya putusan Hakim pada Mahkamah Agung tersebut tidak memberikan kekuatan eksekusi dalam amar putusannya kepada 14 Perusahaan Asian Agri Group sudah sangat tepat karena doktrin “vicarious liability” tersebut hanya dapat diterapkan secara nyata jika sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-Undang (mempunyai landasan hukum secara normatif);</i></p> <p>Bahwa selanjutnya di dalam Amar Putusan Mahkamah Agung di halaman 473 – 474 tidak terdapat satu pun amar putusan yang menginstruksikan maupun memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT.</p> <p>Bahwa di dalam amar putusan Nomor 3 dikatakan: <i>“.....dengan syarat khusus dalam waktu satu (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing;”</i></p> <p>Bahwa sudah sangat jelas yang diinstruksikan oleh MA kepada 14 perusahaan adalah membayar Denda, bukan memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT untuk menagih pajak terutang. Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bahwa sesuai dengan semua ketentuan di dalam Pasal-pasal UU KUP yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas, apabila Termohon Peninjauan</p>
--	--	--



Kembali (semula Terbanding) hendak menerbitkan SKPKB dan SKPKBT maka mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah harus sesuai dengan UU KUP dimana dalam kenyataannya hal ini telah dilanggar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

Bahwa lebih lanjut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengutip pendapat R. Wiyono SH yang berbunyi:

"Pembatasan ini diadakan, oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat lagi digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini...tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara";

Bahwa sudah sangat jelas yang dimaksud dengan jenis keputusan yang tidak dapat lagi digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut R. Wiyono, S.H. adalah keputusan yang tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Permohonan Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan ini jelas mengandung nilai sengketa pajak yang masih harus diperjelas dan dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu darimana perhitungan pajak kurang dibayar dilakukan, pos-pos biaya atau penghasilan yang dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan alasan koreksinya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa hanya menggunakan Putusan MA sebagai alasan untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT karena sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butir-butir di atas, bahwa sesuai dengan ketentuan di dalam UU KUP, Putusan MA hanya bisa dijadikan sebagai data lain yang masih harus dilakukan proses pemeriksaan;

Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengutip pendapat Indroharto yang berbunyi:

"Agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus sesuai dengan atau tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukum atau amar putusan dari putusan badan peradilan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud"



Bahwa sudah sangat jelas pemahaman Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pendapat Indroharto adalah keliru karena SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidaklah sesuai dengan amar Putusan MA, karena tidak ada amar Putusan MA yang memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan SKPKB dan SKPKBT sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di atas;

Bahwa SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas mengandung nilai sengketa yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHV sebagai dasar penerbitan SKP tidak sesuai dengan ketentuan UU KUP beserta dengan peraturan pelaksanaannya dan dengan demikian, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun mengakui di dalam semua persidangan di pengadilan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana angka pajak kurang bayar yang tercantum di dalam Putusan MA tersebut dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak dapat memberikan perincian perhitungan pajak kurang dibayar tersebut;

Bahwa hal inilah yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Permohonan Banding bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperlmasalahakan kebenaran dari pajak yang masih harus dibayar tersebut berikut dengan perincian pos-pos yang dikoreksi dan alasan koreksinya sebagaimana terdapat di dalam surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman 4 Butir 3 yang berbunyi:

"Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S-7081/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga kami tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan Pemeriksa";

Bahwa di dalam Surat Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman



5-6 butir 3 sebagai berikut:

"Dalam Surat pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S-7081/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 14 Mei 2013 maupun dalam SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 tersebut tidak memuat perhitungan pajak terutang sesuai dengan ketentuan di atas, namun langsung mencantumkan pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya, sehingga Pemohon Banding tidak mengetahui dasar koreksi yang dilakukan Terbanding selaku Pemeriksa di dalam proses verifikasi";

Halaman 6 butir 4 sebagai berikut:

"...Dan tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon Banding selaku wajib Pajak mengenai perincian perhitungan koreksi-koreksi yang dilakukan"

Halaman 6-7 butir 6 sebagai berikut:

"tidak terdapat perincian perhitungan atas koreksi-koreksi yang dilakukan sebagaimana telah diminta oleh Pemohon Banding selaku Wajib Pajak berulang kali namun tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak Terbanding dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan Mahkamah Agung...."

Halaman 7 butir 9 sebagai berikut:

"tidak pernah diberitahu maupun diberikan perincian dan alasan koreksi meskipun Pemohon Banding sudah memintanya sebanyak dua kali sebelum Surat Keberatan disampaikan. Dalam Surat Permohonan Keberatan kembali Pemohon Banding bermohon agar diberikan perincian dan alasan koreksi namun sampai dengan tanggal surat ini perincian dan alasan koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 namun tidak pernah diberikan kepada Pemohon Banding."

Halaman 8 butir 11 sebagai berikut:

"....tidak diketahui dasar koreksi, perincian koreksi maupun perincian perhitungan serta Dasar Pengenaan Pajak..."

Halaman 8-9 butir Kesimpulan dan permohonan sebagai berikut:

"Pemohon Banding mohon kepada Majelis Yang Terhormat untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Sehingga menurut Pemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut:



- Dasar Pengenaan Pajak Rp-
- PPh Pasal 26 Terutang Rp-
- Kredit Pajak Rp-
- PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp-
- Sanksi Administrasi Rp-
- Jumlah yang masih harus Dibayar Rp NIHIL”

Bahwa di dalam Surat Bantahan SUB Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) halaman 29-30 Nomor 2 di bagian Permohonan berbunyi:

“Majelis Hakim yang Terhormat sebagai tempat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum untuk dapat memberikan dan membahas secara terperinci mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak (“DPP”) berikut dengan pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi dan perincian perhitungan pajak terutang yang dilakukan dalam penerbitan SKPKB Nomor 00004/204/02/073/13 Tertanggal 23 Mei 2013 dan KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dikarenakan kami tidak mendapatkan perincian DPP tersebut selama proses pemeriksaan maupun keberatan, maupun di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor tersebut di atas, sehingga dapat menyebabkan terjadinya dua kali koreksi yang merugikan kami sebagai Pemohon Banding dan juga hilangnya Hak Pemohon Banding telah direnggut secara paksa dengan tidak diberikannya perincian-perincian tersebut di atas”

Sudah sangat jelas berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ke Pengadilan Pajak dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertanyakan SUBSTANSI permasalahan berupa KEBENARAN ANGKA PAJAK KURANG DIBAYAR berikut dengan perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya, dan oleh karena di dalam proses pemeriksaan maupun verifikasi nya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengungkapkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding masalah prosedur penerbitan SKP itu sendiri. Sudah jelas bahwa di dalam SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



		<p>mengandung NILAI SENGKETA PAJAK yang masih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Pengadilan Pajak ini;</p> <p>Bahwa dengan demikian adalah TIDAK BENAR apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu menyampaikan di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempermasalahkan nilai sengketa pajak;</p> <p>Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Terhormat pahami bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan apa yang menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sudah dipersyaratkan di dalam UU KUP berikut peraturan pelaksanaannya yaitu berupa perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, perincian perhitungan pajak yang terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melampaui kewenangannya. Dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding bahwa besar nya pajak terutang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah NIHIL. Hal ini dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) buktikan di dalam Persidangan di Pengadilan Pajak ini apabila Majelis memerlukannya.</p>
4	<p>Walaupun pihak yang terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah Suwir Laut selaku individu, namun perbuatannya semata-mata untuk kepentingan atas Korporasi Asian Agri Grup sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana individual liability dengan corporate liability harus dilakukan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin <i>respondeat superior</i> atau <i>doktrin vicarious liability</i>.</p>	<p>Bahwa UU KUP tidak menganut adanya doktrin "<i>respondeat superior</i>" atau "<i>Vicarious Liability</i>". Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB/SKPKBT maupun Keputusan Keberatan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengakui hal ini yang dapat kita lihat dalam Keputusan Keberatan yang sama sekali tidak ada menggunakan doktrin ini sebagai pertimbangan dalam penolakan terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Keputusan Keberatan diproses dan diterbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP.</p> <p>Bahwa Asas " praduga tidak bersalah " seharusnya diterapkan di dalam setiap peristiwa hukum, dimana dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Korporasi tidak pernah didakwa, tidak pernah diperiksa, didakwa dan disidangkan dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela</p>



diri di dalam persidangan untuk Suwir Laut. Di dalam persidangan di Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pun, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang didakwa, semua kewajiban perpajakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah diperiksa, disidangkan dan tidak pernah diperiksa di dalam proses persidangan perkara dengan terdakwa (tunggal) yang bernama Saudara Suwir Laut termasuk perhitungan pajak kurang dibayar seandainya ada;

Bahwa Putusan MA dengan Nomor tersebut adalah putusan untuk individu dikarenakan individu tersebut bukan kuasa/direksi dari 14 korporasi. Individu tersebut hanya merupakan tax manager group yang membantu proses administrasi perpajakan, beliau tidak memiliki kuasa dalam hal apapun termasuk pengambilan keputusan dan tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa penandatanganan SPT tersebut dilakukan oleh Direksi dan bukan oleh Individu tersebut. Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP, Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus.

Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473-678, dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi tersebut.

Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus.

Bahwa lebih lanjut di dalam amar pertimbangan di halaman 472 dari Putusan MA tersebut dinyatakan bahwa *"....karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan."*

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan semua alasan-alasan dan kenyataan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) paparkan di atas



	<p>bahwa Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi.</p> <p>Bahwa hal tersebut juga didukung oleh pendapat dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc (Bukti-P04).</p> <p>Bahwa selanjutnya menurut Dr. Wirawan B. Ilyas, AK, MSi, S.H., M.H., CPA, CA di dalam kajiannya yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang melalui jurnal Jilid 42 Nomor 3 Juli 2013 yang berjudul Problem Hukum Penuntasan Kasus Pajak Suatu Analisis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239 Tahun 2012 (Bukti-P03), dikatakan bahwa “...dalam putusannya MA menggunakan doktrin hukum vicarious liability...namun MA sendiri meragukan doktrin hukum yang diterapkannya..Oleh karena dalam Putusan MA juga dinyatakan bahwa MA menyadari gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara tersebut tidak didakwa (lihat hal. 427).”</p> <p>Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 427 dinyatakan “yang menjadi persoalan apakah pandangan hukum kasasi MA sudah mencerminkan rasa keadilan dalam proses pungutan pajak? Dan apakah Putusan MA telah mempertimbangkan pada pemahaman filosofi pungutan pajak yang sejak semula dimaksudkan untuk mencapai penerimaan Negara dan bukan untuk memidana Wajib Pajak?.....apakah untuk menegaskan besarnya pajak terutang bisa dilakukan atas dasar Putusan MA dan bukan atas dasar Surat Ketetapan Pajak? Apakah Undang-Undang pajak memungkinkan fungsi MA membuat perhitungan besaran pajak terutang yang harus dilunasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)?”</p> <p>Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 431 dinyatakan “Selanjutnya, SKPKB yang diterbitkan harus mengacu pada prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 29 UU KUP. Atas dasar itu, putusan kasasi MA yang memerintahkan supaya AAG membayar kerugian Negara yang dihitung oleh ahli perhitungan pajak, menjadi cacat hukum. Oleh karena besaran pajak yang harus dibayar tidak melalui mekanisme atau prosedur administrasi pemeriksaan pajak....Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menjadi kata kunci (keywords) bahwa putusan kasasi MA belum dapat secara langsung menjadi dasar menagih utang pajak AAG. Pemerintah cq Direktorat jenderal Pajak harus tetap melakukan mekanisme administrasi melakukan pemeriksaan biasa</p>
--	---



		<p><i>(bukan pemeriksaan bukti permulaan) untuk menghitung besaran pajak terutang yang menjadi kewajiban AAG.”</i></p> <p>Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 434 bahwa “...Persoalan penuntasan kasus pembayaran utang pajak lebih kentara apabila pemerintah juga melihat penuntasan kasus pajak yang pernah dilakukan terhadap WP bernama Paulus Tumewu, Direktur Utama PT Ramayana Lestari...tampak jelas pemerintah telah melaksanakan ketentuan undang-undang pajak sesuai jalur atau mekanisme yang sebenarnya yaitu melalui jalur hukum administrasi.”</p> <p>Bahwa lebih lanjut menurut pendapat hukum dari Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil;M.B.L.;M.H.;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (Bukti-P06), di dalam halaman 3 bahwa “Putusan Mahkamah Agung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima, memeriksa dan memutus mengenai hal-hal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.”</p> <p>Bahwa di halaman 4 bahwa “apalagi, manakala hakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke-14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus terhadap legal entity yaitu 14 perusahaan yang tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.”</p> <p>Bahwa di halaman 5 bahwa “Dengan demikian putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (Onvoeldoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (non excecutable) terhadap yang tidak didakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan legal entity.”</p> <p>Bahwa berdasarkan kajian dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa SKP yang diterbitkan semata-mata atas dasar Putusan MA adalah cacat hukum, karena tidak melalui jalur hukum administrasi. Dengan demikian, maka Pengadilan Pajak sudah seharusnya dan berkewajiban untuk memproses Permohonan Banding ini tanpa ragu-ragu terutama karena Permohonan Banding ini mengandung sengketa pajak dan nilai sengketa pajak yang masih perlu diuji kebenarannya oleh Pengadilan Pajak.</p>
5	Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Bahwa dasar hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) gunakan dalam mengajukan



<p>menyatakan bahwa pengajuan Permohonan Banding hanya diperuntukkan untuk sengketa materi saja bukan formal.</p>	<p>Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan adalah Pasal 27 UU KUP dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan proses Banding atas Keputusan Keberatan tanpa ketentuan khusus kriteria dari Keputusan Keberatan tersebut.</p> <p>Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa atas Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah seharusnya dapat dilanjutkan ke proses banding sebagai Hak dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sudah dijamin oleh UU KUP.</p> <p>Bahwa dalam hal ini, pada Keputusan Keberatan tersebut terdapat sengketa pajak berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Materi: yaitu adanya Pajak terutang yang tidak diketahui darimana perhitungannya, dan pos-pos mana yang dikoreksi, apakah sudah memperhitungkan kompensasi kerugian dan pajak yang dibayar dimuka atau belum dan terlebih untuk tahun pajak yang sudah pernah diterbitkan SKP sampai dengan Putusan MA, apakah terdapat double koreksi atau tidak, dimana hal ini menjadi HAK dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengetahuinya sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP berikut dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP.2. Formal: yaitu SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkan dengan menggunakan UU KUP namun di dalam SPHP/SPHV maupun berita acara jelas tidak terdapat adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP untuk SKP melalui proses pemeriksaan. Di dalam SKP hanya tercantum satu angka sebagai Pajak kurang dibayar. <p>sehingga sudah seharusnya Keputusan tersebut diajukan</p>
---	---



		<p>ke proses Banding di Pengadilan Pajak terlebih lagi karena pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah mengenai masalah yang sama dengan materi dari sengketa pajak itu sendiri yaitu tidak adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang.</p> <p>Bahwa penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas juga didukung oleh pendapat ahli pajak yang merupakan akademisi yaitu Dr. Wirawan B. Ilyas, AK, MSi, S.H., M.H., CPA, CA di dalam kajian ilmiah pemeriksaan Pajak terhadap Asian Agri Group (sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lampirkan di dalam surat bantahan SUB Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Pengadilan Pajak) (Bukti-P05) dimana dikatakan bahwa telah terjadi kekeliruan prosedur penerbitan SKPKB dan SKPKBT yang dilakukan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).</p>
6	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan eksekutor secara tidak langsung dan Jaksa sebagai eksekutor secara langsung.</p>	<p>Bahwa berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu dictum/amar pun yang memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA, dengan demikian hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (<i>on rechtmatige overheidsdaad</i>).</p> <p>Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 270 KUHP dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa "pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa". Dengan demikian, sudah jelas bahwa, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menjadi pelaksana/eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menerbitkan SKP sebagai bentuk pelaksanaan dari Putusan MA <i>a quo</i>.</p> <p>Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meminta dasar hukum dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menjadi eksekutor dari Putusan Pengadilan untuk perkara pidana karena hal tersebut menyebabkan eksekusi ganda karena Putusan MA telah di eksekusi oleh Kejaksaan Agung.</p>



		<p>Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc (Bukti-P04) pada halaman 13 dan 14 butir 12 dan yang menyatakan bahwa "Bahwa DJP dalam perkara pidana tidaklah dapat bertindak selaku eksekutor/bukan eksekutor."</p> <p>Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeinginan untuk menerbitkan SKP seyogyanya dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi yang benar dan yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.</p>
7	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan informasi yang berbeda dengan persidangan sebelumnya yaitu Putusan MA merupakan keterangan lain yang menjadi dasar penerbitan SKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (5) UU KUP.</p>	<p>Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) informasikan, dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah tidak konsisten dalam memberikan penjelasan dan alasan atas dasar penerbitan SKP. Di dalam semua persidangan awal (sidang pertama) di Pengadilan Pajak dimana sebelumnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas menyatakan bahwa DJP dalam hal ini merupakan eksekutor secara tidak langsung dari Putusan MA. Hal ini menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).</p> <p>Bahwa lebih lanjut, dalam hal memang benar Putusan MA merupakan keterangan lain sesuai Pasal 13 ayat (5) UU KUP, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya melaksanakan seluruh proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012.</p> <p>Bahwa lebih lanjut di dalam semua persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mengatakan dan menekankan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan proses pemeriksaan maupun verifikasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT.</p> <p>Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, maupun peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses</p>



		<p>pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya.</p> <p>Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Putusan MA merupakan keterangan lain, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), SKP yang diterbitkan, sudah sangat jelas tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN dikarenakan SKP tersebut diterbitkan tidak sebagai pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara. SKP tersebut mengandung nilai sengketa yang masih dipersengketakan. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa memaksakan Pengadilan Pajak untuk tidak memproses Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini.</p>
8	<p>Bahwa pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menegaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan/verifikasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu tidak melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi dan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT.</p> <p>Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyatakan dengan tegas di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memberikan perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak dapat memberikan perincian perhitungan pajak terutang, bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana asal muasal pajak kurang</p>	<p>Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan pada surat Permohonan Banding dan Bantahan Surat Uraian Banding (SUB), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai pelaksanaan prosedur pemeriksaan/verifikasi yang tidak dijalankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, maupun peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya.</p> <p>Bahwa untuk lebih jelasnya, sampai sebelum proses Banding dilaksanakan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah beberapa kali meminta detail koreksi dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap saja tidak memberikan detail koreksi yang diminta. Padahal hal tersebut merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak untuk mengetahui detail koreksi.</p> <p>Bahwa lebih lanjut pun berdasarkan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebutkan pada butir 2 di atas yaitu Pasal 31 UU KUP itu</p>



	<p>dibayar yang tercantum di dalam Putusan MA tersebut.</p>	<p>sendiri, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP, bahwa SPHV harus memuat perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksinya.</p> <p>Bahwa dengan demikian di dalam surat tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penerbitan SPHP/SPHV, sampai dengan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempertanyakan dua hal yaitu materi koreksi berikut dengan materi pengenaan pajaknya, dan formalitas penerbitan SKP yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan bahwa mereka tidak melakukan proses pemeriksaan/ verifikasi dan analisa pajak kurang dibayar tersebut. Bahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui di dalam semua persidangan Pengadilan Pajak bahwa mereka tidak tahu dari mana asal muasal pajak kurang dibayar tersebut diperoleh.</p> <p>Bahwa dengan demikian, sudah seharusnya Pengadilan Pajak memproses Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini demi memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak. Dan apabila Pengadilan Pajak menolak untuk memproses Permohonan Banding ini, maka pihak Pengadilan Pajak pun telah melanggar Undang-Undang Pengadilan Pajak itu sendiri dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semakin tidak mendapatkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi haknya.</p>
<p>9</p>	<p>Apakah sudah dilakukan pembayaran atas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Suwir Laut?</p>	<p>Bahwa sampai dengan saat ini, sebagaimana diberitakan dalam media massa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembayaran atas sanksi pidana sebesar 50%.</p> <p>Bahwa pembayaran ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Perusahaan Nasional Indonesia menghargai keputusan dari Mahkamah Agung selaku Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia dan untuk menghindari penagihan paksa oleh pihak Kejaksaan yang akan mengganggu kegiatan operasional dan ketenangan bekerja karyawan dan mitra petani plasma Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sebagaimana yang diketahui melalui media massa pula pada siaran pers</p>



		<p>tanggal 9 Januari 2014 bahwa Jaksa telah menyampaikan peringatan “<i>Jangan sampai kita nanti melakukan penyitaan sehingga menimbulkan dampak-dampak yang tidak kita inginkan. Syukur-syukur ini nanti dibayar tunai jadi tidak ada penyitaan. Kalau tidak, akan ada proses upaya paksa.</i>”</p> <p>Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap tidak setuju dengan putusan tersebut karena sekali lagi dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut bahwa pihak korporasi bukanlah pihak yang didakwa.</p> <p>Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc pada halaman 3 butir 4 dan 5 ditegaskan bahwa: “<i>Bahwa dalam ketentuan pidana, yang didakwa oleh Penuntut Umum adalah orang yang dianggap bertanggung jawab dalam suatu perbuatan pidana, yaitu pelaku pidana itu sendiri, dalam ketentuan pasal 1 butir 15 KUHAP dijelaskan yang dimaksud dengan "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan", dihubungkan dengan putusan kasasi Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012, maka oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa Suwir Laut dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pihak yang didakwa dengan menggunakan pasal 39 UU KUP, maka unsur "setiap orang" yang ada dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah menunjuk kepada diri Suwir Laut sebagai individu, hal itu sesuai pasal 143 ayat (2) KUHP dan pasal 193 KUHAP.</i></p> <p><i>Bahwa suatu amar Putusan Pengadilan tidak dapat diartikan lain selain yang tertuang dalam amar putusan tersebut. Di dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tertanggal 18 Desember 2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut tersebut tidak ada satu kalimat-pun yang menyatakan menghukum perusahaan, syarat khusus yang ditentukan dalam putusan tersebut hanya diberlakukan terhadap Terdakwa Suwir Laut sebagai pihak yang didakwa bukan terhadap perusahaan, adalah suatu pemikiran yang sangat sederhana dalam suatu negara hukum, bagaimana mungkin pengadilan dapat memutus bersalah suatu subjek hukum tanpa ada kesempatan bagi subjek hukum itu sendiri untuk diadili dan diberikan hak untuk membela diri.”</i></p>
10	Didalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)	Bahwa di dalam amar pertimbangan halaman 586 dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST tertanggal 15 Maret 2012



menyatakan bahwa pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan MA sudah tidak terbantahkan dan sudah diyakini semua perhitungan telah dilakukan di dalam proses Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

(Bukti-P07) dinyatakan "Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dalam perkara ini mestinya tidak langsung diterapkan mekanisme hukum pidana.." Amar Pertimbangan Nomor 2: ".....untuk dapat menerapkan sanksi pidana denda pada Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, harus ditetapkan dulu oleh DJP berapa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan melalui penerbitan SKP."

Amar Pertimbangan Nomor 5: "pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakikatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan Negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan."

Amar Pertimbangan Nomor 10: "Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana M. Yahya Harahap, S.H., dan Ahli Hukum Pidana DR. Chairul Huda, S.H.,MH., serta Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. DR. Philipus M. Hadjon, S.H., dan Ahli Perpajakan Drs Sunarto M.si, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penegakan hukum pajak."

Amar Pertimbangan Nomor 11: "Lampiran Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 tanggal 17 Mei 2002 sebagai berikut: "Pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (ultimum remedium) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya."

Amar Pertimbangan Nomor 12: "Ahli Perpajakan Drs Sunarto, Msi, berpendapat jalur administrasi dan jalur pidana tidak dapat berjalan bersama..."

Pendapat Majelis di halaman 590 bahwa "...sebelum DJP menempuh upaya hukum pidana seharusnya DJP menempuh dulu upaya hukum administrasi untuk menyelesaikan permasalahan pajak ini yaitu dengan menerbitkan SKP.....karena konsekuensinya DJP harus menetapkan besarnya pajak terutang melalui SKPKB atau SKPKBT jika menganggap ada kekurangan bayar pajak dalam perkara ini.."



		<p>Bahwa berdasarkan semua amar pertimbangan di dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri selaku Pengadilan Tingkat Pertama dari perkara <i>a quo</i> ini tidak pernah melakukan pemeriksaan, verifikasi maupun analisa angka sehingga didapat pajak kurang dibayar sebagaimana yang dikatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan. Semua pajak kurang dibayar yang dicantumkan di dalam Putusan Mahkamah Agung semata-mata merupakan angka dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak diketahui asal usulnya karena tidak pernah dibahas dan diungkapkan di dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.</p> <p>Bahwa Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini adalah DJP telah keliru dalam penerbitan SKP nya dan juga bahwa pajak kurang dibayar yang tercantum di dalam Putusan Mahkamah Agung masih memerlukan pengujian lebih lanjut dan harus diinformasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).</p>
11	<p>Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa mereka meyakini di dalam persidangan di Pengadilan Pajak tidak ada double koreksi, dan semua pajak yang sudah dibayar dimuka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kerugian pajak yang masih boleh dikompensasikan telah di perhitungkan di dalam penerbitan SKP <i>a quo</i>.</p>	<p>Bahwa bagaimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bisa meyakini kebenaran tersebut bahwa tidak ada double koreksi, dan semua pajak yang sudah dibayar dimuka oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan kerugian pajak yang masih boleh dikompensasikan telah di perhitungkan di dalam penerbitan SKP <i>a quo</i>, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah secara jelas dan nyata selalu menyatakan di dalam persidangan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah tidak melakukan proses pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan biasa dan tidak melakukan analisa terhadap angka-angka yang dicantumkan di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut?</p> <p>Bahwa bagaimana pula pertanggungjawaban Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas hal ini dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga secara jelas menyatakan di dalam persidangan di Pengadilan Pajak bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui darimana semua angka-angka ini diperoleh, mereka hanya semata-mata menggunakan angka yang tertera di dalam Putusan Mahkamah Agung, hal yang sama juga dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam surat jawaban atas permintaan alasan</p>



	<p>dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang pajak kurang dibayar dan pos-pos yang dikoreksi.</p> <p>Bahwa lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana dengan dasar SKP PPh Pasal 26 <i>a quo</i> yang diterbitkan apakah terkait dengan SKP <i>a quo</i> untuk PPh Badan? <p>Bahwa berdasarkan UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai Hak untuk mendapatkan semua informasi tersebut sebagaimana yang sudah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) uraikan di butir-butir di atas.</p>
--	--

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dirangkum poin-poin terkait sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak, antara lain:

I. Aspek Formal Pengajuan Banding

Bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sedangkan Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. (*Vide* Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU PP diatur bahwa "*Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Bahwa sesuai dengan peraturan di atas, secara jelas dinyatakan bahwa dalam hal masih terdapat sengketa pajak (mengandung nilai sengketa) antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak ("DJP"), terhadap Keputusan Keberatannya dapat diajukan ke Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam asas hukum dikenal asas *lex specialis derogat lex generalis* yaitu jika peraturan mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang



umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut;

Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur dengan undang-undang tersendiri dan mempunyai kompetensi absolut yang berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 S.T.D.T.D Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara jelas terlihat ada pengkhususan untuk jenis pengadilan berdasarkan peraturan tersebut, dimana berdasarkan Pasal 8 dinyatakan bahwa "*Pengadilan terdiri atas:*

- a. *Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;*
- b. *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.*";

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 9A ayat (1) dan memori penjelasan dalam peraturan yang sama menetapkan bahwa "*Di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.*";

Penjelasan:

"Pengadilan khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya Pengadilan Pajak.";

Bahwa berdasarkan peraturan di atas, menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akanlah sangat tidak tepat jika Pengadilan Pajak diharuskan tunduk dengan seluruh aturan UU PTUN karena Pengadilan Pajak telah memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur hukum acara pengadilannya secara jelas dan terperinci. Terlebih lagi, dapat dilihat dengan jelas bahwa UU PTUN tidak disebutkan dalam bagian konsideran/mengingat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa penempatan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 18 *juncto* Pasal 25 *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hanya mengenal 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. *Pengkhususan dimaksudkan sebagai bentuk diferensiasi dan



spesialisasi bidang hukum yang ditangani oleh pengadilan. (**Vide* Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Makalah disajikan dalam diskusi terbatas tentang integrasi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Satu Atap Pada tanggal 2 Maret 2011 di Hotel Mercure Ancol Jakarta). (Catatan dikenal dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*). Selain itu, sesuai dengan asas *lex posterior derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini penjelasan Pasal 48) dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka yang berlaku haruslah aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terbit lebih akhir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (*Vide* Tim Kompendium Bidang Hukum Tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Perpajakan Tahun 2011);

Bahwa dengan demikian, secara jelas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sengketa ini, Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan independen yang memiliki hukum acara persidangan sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam UU PP sehingga sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 35 UU PP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), atas Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat diajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. (*Vide* Pasal 31 *juncto* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur mengenai pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dibaca pada Penjelasan Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan karena oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini;

Bahwa dalam hal ini KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 secara jelas dan nyata merupakan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah menolak permohonan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan demikian Keputusan Keberatan dengan Nomor tersebut, ruang lingkup pengaturannya bukan berada di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan pengaturannya di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB *a quo* berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga telah memproses permohonan keberatan atas permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut dengan menggunakan UU KUP yang menghasilkan ketetapan Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan ketentuan UU KUP memperbolehkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengajukan keberatan atas SKPKB *a quo* sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku. Sehingga sesuai dengan Pasal 27 UU KUP, sudah seharusnya atas KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak untuk mengajukan Permohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Pajak;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pelaksana secara tidak langsung terhadap Putusan Mahkamah Agung, namun di dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Jika dikatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara tidak langsung sebagai Pelaksana

Halaman 61 dari 129 halaman. Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015



Putusan Mahkamah Agung, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus memiliki dasar hukum yang jelas dimana hal ini pun tidak pernah diatur di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan dalam prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Keputusan Keberatan tidak terdapat pengaturan tentang Keputusan atas Hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung sehingga yang berlaku adalah Ketentuan Umum Perpajakan. Dari alur yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dasar UU KUP merupakan prosedur penerbitan yang sama dengan Keputusan Keberatan yang lainnya dan tidak ada perbedaan apapun, secara UU KUP pun tidak ada Pasal yang melakukan perbedaan tersebut, dengan demikian sudah seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki Hak Penuh untuk mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Keberatan tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak ada ketentuan dalam UU KUP yang menyebutkan adanya pengecualian untuk Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding. Dan juga seperti yang telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memproses pengajuan keberatan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan sampai dengan mengeluarkan Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur UU KUP. Dan di dalam SUB juga sudah dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Permohonan Banding telah sesuai dengan ketentuan dan dapat diproses di Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak ditemukan ketentuan yang mengatur Keputusan Keberatan yang dikeluarkan terhadap SKPKB/SKPKBT yang terbit atas dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai Keputusan yang tidak dapat diajukan Banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan dasar hukum Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa *asas lex specialis derogat lex generalis* harus diterapkan dalam Permohonan Banding Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang independen dan memiliki hukum acara tersendiri. Undang-Undang PTUN mengatur hukum acara gugatan. Maka dari itu, segala sesuatu yang sudah jelas dinyatakan dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PTUN merupakan keputusan yang bisa diajukan banding haruslah telah memenuhi ketentuan formal;

Bahwa selanjutnya, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 34 dalam UU KUP menyebutkan bahwa *“Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.”*;

Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa *“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”*;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menggunakan pengertian Keputusan dalam UU PTUN karena pengertian dari Keputusan Keberatan telah diatur secara khusus dalam UU KUP dan atas Keputusan Keberatan tersebut dapat diajukan Banding ke Badan Peradilan Pajak yang dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memberikan ilustrasi adanya peraturan yang tidak sejalan antara UU PTUN dengan UU KUP sebagai contoh:

Pasal 3 UU PTUN

1. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;



Pasal 26 UU KUP

1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
2. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.”;
4. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

Bahwa sesuai dengan penjelasan 2 Pasal di atas, terlihat jelas bahwa UU PTUN dan UU PP tidak selamanya dapat sejalan, maka sesuai dengan asas *lex posteriori derogat lex anteriori*, apabila terdapat perbedaan-perbedaan pengaturan dalam UU PTUN dengan UU KUP, maka yang berlaku haruslah aturan dalam UU KUP itu sendiri;

Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan sebelumnya, atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara jelas dapat dilanjutkan ke proses Banding mengingat Pengadilan Pajak memiliki hukum acara tersendiri sebagaimana diatur dalam UU PP;

Bahwa pengadilan khusus tersebut dibentuk atas dasar amanat Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah amandemen keempat yakni bentuk peradilan hanya ada 4 yaitu peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sehingga seluruh pembentukan pengadilan khusus harus dimasukkan ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang ada meskipun tata cara dan cara beracara sampai perekrutan hakim memiliki spesifikasi dan kekhususan masing-masing. (dikutip dari catatan pengantar dari buku Prof. Jimly halaman 4 dan 5);

Bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN hanya dapat diterapkan untuk proses Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena jelas terlihat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU PTUN tidak ada satupun pembahasan mengenai proses banding. Hal tersebut jelas terlihat Pasal 1 pada UU PTUN yang mana pada pasal tersebut hanya ada pengertian mengenai Gugatan dan tidak ada pengertian mengenai Banding. Sehingga UU PTUN merupakan peraturan yang mengatur mengenai sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;

Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf>) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untuk memutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini jelas seperti rel kereta api yang memang berjalan beriringan tetapi tidak dapat digabungkan dan keputusan tersebut merupakan keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan. Di dalam Pasal 1 UU PTUN yang berisi pengertian yang dijelaskan hanyalah gugatan dan tidak terdapat satupun kalimat yang menyebutkan banding. Oleh karena itu, dasar hukum yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadi tidak relevan (lihat dan kutip Pasal 1 beserta penjelasan dari UU PTUN). Selanjutnya juga mengenai upaya lanjutan dari Pengadilan Pajak dan PTUN juga berbeda. PTUN mengenal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sedangkan Pengadilan Pajak sudah merupakan putusan *inkracht* yang jika dipersamakan dengan Pengadilan lain merupakan Putusan Kasasi. Upaya lanjutan dari Pengadilan Pajak hanyalah Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Sedangkan PTUN masih harus melakukan Banding dan Kasasi sebelum dapat mengajukan Peninjauan Kembali;

Bahwa contoh yang selalu diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yakni contoh keputusan Dirjen Agraria menjadi tidak relevan karena hal itu sebelumnya merupakan sengketa perdata dan kemudian sudah diputuskan bahwa tanah tersebut merupakan milik negara. Jadi sertifikat yang diterbitkan tidak dapat diajukan gugatan lagi mengenai status kepemilikan atau sertifikat yang diterbitkan oleh Dirjen Agraria. Dalam hal ini jelas berbeda dengan sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan, karena proses yang dilakukan oleh

Halaman 65 dari 129 halaman. Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015



Mahkamah Agung merupakan tuntutan kepada individu dan bukan korporasi dan berikutnya adalah bahwa dalam hal ini contoh yang diambil mengenai sengketa gugatan kepemilikan tanah. Hal itu jelas bahwa dalam pertimbangan pengadilan perdata menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan dan diambilalih menjadi tanah negara. Sehingga tentu Dirjen Agraria dalam hal ini berwenang untuk menerbitkan sertifikat baru karena yang menjadi *dispute* memang hanyalah status kepemilikannya. Dalam kasus Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tentu tidak bisa diperlakukan sama, karena selain Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah pihak yang disidangkan, bahwa sengketa ini juga merupakan ranah sengketa pajak yang tentu memiliki aturan tersendiri dan harus dipatuhi oleh pihak Direktur Jenderal Pajak. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan aturan yang bersifat khusus ini tentulah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak mengajukan upaya banding sesuai amanat UU KUP. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) percaya bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya bisa melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik, dan mampu memahami bahwa sengketa ini seharusnya memang berada di ranah tersendiri yang spesifik dan merupakan sengketa yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa mereka bukanlah eksekutor dan menganggap bahwa putusan Mahkamah Agung merupakan keterangan lain. Hal ini membuktikan bahwa pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya menyadari dengan adanya *statement* tersebut maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Jika melihat contoh Pasal 2 huruf e UU PTUN maka jelas bahwa Dirjen Agraria dan bagian kepegawaian merupakan pelaksana dari putusan pengadilan (eksekutor), hal ini terlihat dalam contoh 2 dan contoh 3. Jika kita melihat contoh 1 maka status kepemilikan tanah tersebut dinyatakan bukan merupakan tanah warisan yang disengketakan para pihak melainkan menjadi tanah negara. Maka jika Dirjen Agraria menerbitkan sertifikat baru atas tanah tersebut tentu tidak bisa diajukan gugatan, karena putusan pengadilan perdata mengembalikan hak tanah tersebut kepada Dirjen Agraria. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat memahami contoh ini, namun ini sangatlah berbeda dengan sengketa yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) hadapi. Bahwa baik dalam pertimbangan maupun amar putusan tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki hak untuk menerbitkan ketetapan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak bisa dipersamakan dengan sengketa tanah yang ada dalam Pasal 2 huruf e UU PTUN, contoh dalam Undang-Undang sangatlah gamblang dan mudah untuk dipahami dan tentunya esensi dari pasal tersebut juga seharusnya bisa dijalankan oleh seluruh pihak. Jika contoh pasal ini yang dijadikan perumpamaan kasus ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) khawatir bahwa sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas dalam aplikasinya oleh penyelenggara pemerintahan negara ini. Selain itu putusan Mahkamah Agung untuk kasus yang menimpa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini seharusnya juga merupakan *Ultimum Remedium* sehingga tidak membutuhkan *campur tangan Direktorat Jenderal Pajak* lagi untuk menyelesaikan sengketa ini. Jika pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengaitkan kewenangannya dengan Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UU KUP juga tidaklah relevan karena pasal tersebut menjelaskan bahwa jika dalam suatu sengketa ada bagian pajak yang belum di putus maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan SKPKB/SKPKBT. Dan hal itupun tidak dikecualikan untuk dapat diajukan Keberatan dan Banding;

Bahwa Undang-Undang PTUN hanyalah untuk sengketa Gugatan bukan untuk Pengajuan Banding. Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal;

Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP dan Undang-Undang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;

Bahwa dengan demikian, Permohonan Banding merupakan objek sengketa pajak yang mengandung nilai sengketa pajak dan memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;



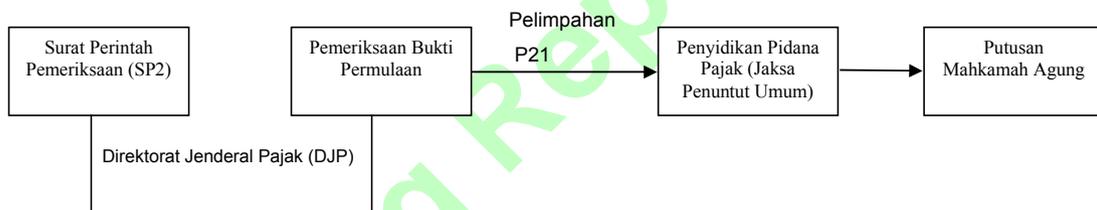
II. Prosedur Penerbitan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak

A. Sanksi Pidana pada Putusan MA bersifat *Ultimum Remedium*

Bahwa dasar Penerbitan SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, yang mana dalam putusannya telah menjatuhkan sanksi pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Nomor 16 Tahun 2000 dan bersifat *ultimum remedium*;

Bahwa pada dasarnya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah upaya paling akhir (*ultimum remedium*) dalam usaha penegakan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku setelah upaya lain yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakkan hukum pajak;

Berikut Tabel untuk Kronologis mulai dari pemeriksaan sampai dengan Putusan MA:



Bahwa dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa sanksi pidana (Pasal 39 UU KUP) hasil dari Putusan Mahkamah Agung bersifat *ultimum remedium* yang merupakan upaya terakhir dari upaya-upaya sebelumnya;

Bahwa dengan demikian, dasar penerbitan SKP dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu berdasarkan Putusan MA adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya sudah tidak ada lagi sanksi lain lagi yang bisa ditagihkan setelah sanksi pidana dan denda ini;

B. Hak DJP menerbitkan SKP

Bahwa pada saat persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyebut bahwa SKP yang diterbitkan merupakan pelaksanaan dari Putusan MA. Namun, berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu *dictum*/amar pun yang memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan



Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan Mahkamah Agung;

Bahwa dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa*;

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak boleh lagi menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut. Menanggapi pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa di Pengadilan Pajak perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa seharusnya menurut Pasal 12 ayat (3) UU KUP DJP harus bisa membuktikan mengenai ketidakbenaran perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga setelah itu baru dapat diterbitkan SKP;
2. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, bahwa Putusan Mahkamah Agung hanya merupakan data bukan sebagai dasar penetapan besarnya pajak terhutang, sehingga perlu dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi;

Bahwa lebih lanjut, apabila Putusan Mahkamah Agung merupakan data atau keterangan lain, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan proses pemeriksaan normal, dengan meminta dokumen dan memeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), bukan bertindak sebagai eksekutor secara langsung maupun tidak langsung dan serta merta menerbitkan SKPKB/SKPKBT tanpa dilakukan prosedur pemeriksaan normal padahal semua SKPKB/SKPKBT tersebut diterbitkan berdasarkan UU KUP;

Bahwa Pasal 2 huruf e UU PTUN mengatur bahwa: *Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Bahwa UU PTUN hanyalah untuk sengketa gugatan. Karena wilayahnya adalah gugatan, sangatlah tidak tepat jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Banding Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah setuju dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Pengajuan Banding atas Keputusan Keberatan merupakan pengajuan atas adanya sengketa, dimana sengketa yang terjadi adalah sengketa pajak dan dasar hukum yang digunakan adalah UU KUP dan Undang-Undang PP, maka yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) minta merupakan prosedur yang lazim ada dalam proses pemeriksaan dan keberatan;

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menunjukkan dasar hukum dan Amar Putusan di Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di perintahkan untuk menerbitkan SKP. Terlebih lagi di dalam Amar Pertimbangan Majelis di halaman 472 telah menyatakan bahwa: "... bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan.";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga meminta dasar hukum dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana menyatakan bahwa data atau keterangan lain merupakan data yang sempurna yang harus dieksekusi melalui penerbitan SKPKB/SKPKBT tanpa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan UU KUP berikut dengan peraturan pelaksanaannya, karena hal tersebut menyebabkan eksekusi ganda, karena atasan Putusan MA tersebut telah dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Agung;

Bahwa mengutip dari Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 Nomor 3, Juli 2013 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang oleh Wirawan B. Ilyas (Bukti-P03) yang dalam pendapat hukumnya menyebutkan bahwa:

"Mekanisme administrasi pemeriksaan selanjutnya mengharuskan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Jika tidak ada dokumen SP2, pemeriksaan tidak bisa berjalan, bahkan sebelum diterbitkan SKPKB, proses pemeriksaan harus melalui tahapan yang disebut pembahasan akhir (closing conference) hasil pemeriksaan antara AAG dengan pemeriksa. Apabila SKPKB terbit tanpa pernah pembahasan akhir, SKPKB pun dapat dibatalkan. Dalam hal demikian, prosedur pemeriksaan harus diulangi melalui mekanisme tahapan administrasi yang benar yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku";

Bahwa ketentuan SKPKB yang dapat dibatalkan dalam hal tidak dilakukan pembahasan akhir sebagaimana mestinya menurut ketentuan yang berlaku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi;

Bahwa wewenang Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam penerbitan SKPKB tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah dijabarkan di Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang artinya penerbitan SKPKB yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan tindakan sewenang-wenang;

Bahwa dengan demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeinginan untuk menerbitkan SKP seyogyanya dilakukan proses pemeriksaan pajak dan/atau proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku;

Di mana ketentuan Pasal 14 ayat (3) tentang verifikasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang menjadi dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013 yang diputus pada tanggal 30 Juni 2014;

Sehingga penerbitan SKPKB Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempunyai dasar hukum, sehingga jelas-jelas melanggar hak Wajib Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;

C. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah Putusan Terhadap Suwir Laut selaku individu;

Bahwa Putusan MA tersebut adalah putusan untuk individu dikarenakan individu tersebut bukan kuasa/direksi dari 14 korporasi. Individu tersebut merupakan tax manager group yang membantu proses administrasi perpajakan, beliau tidak memiliki kuasa dan tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta bukan merupakan karyawan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat buktikan bahwa penandatanganan SPT tersebut dilakukan oleh Direksi dan bukan oleh Individu tersebut. Dan juga dalam Akta Perusahaan, Suwir Laut bukan merupakan Direksi;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 UU KUP dinyatakan sebagai berikut:



Ayat (1)

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus;

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Penjelasan ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Suwir Laut selaku individu tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus yang mana dalam kenyataannya memang bukan pengurus perusahaan;

Bahwa lebih lanjut, dalam amar Putusan MA tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 yang terdapat pada halaman 473-678, dimana tidak terdapat satupun kalimat yang menyatakan bahwa Suwir Laut selaku individu adalah pihak yang berwenang mewakili atau ditunjuk mewakili 14 korporasi tersebut; Bahwa demikian pula pada halaman 1 Putusan MA tersebut yang mencantumkan identitas diri Suwir Laut yang tidak terdapat satu kalimatpun yang mencantumkan Suwir Laut sebagai kuasa atau pihak yang berwenang mewakili 14 korporasi maupun sebagai pengurus;

Bahwa lebih lanjut, mengutip pendapat hukum dari Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil., M.B.L., M.H., S.H., S.S., (Bukti-P06) yang menyebutkan bahwa:

Bahwa dalam memori kasasinya, Jaksa hanya mengemukakan mengenai pertanggung jawaban terdakwa (strafbaarfeit) dan sepanjang dapat dibuktikan maka terdakwa yang dipidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim Kasasi tidak dibenarkan oleh hukum untuk menerima, memeriksa dan



memutus terhadap 14 perusahaan yang tidak pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 183 juncto 184 KUHAP bahwa hakim dilarang memutus untuk pidana kecuali ada bukti yang cukup sedangkan ke 14 perusahaan tidak diajukan dimuka persidangan dan juga tidak ada ketentuannya bahwa legal entity tersebut dapat dipidana, maka disini Majelis Hakim Kasasi telah memutus tanpa suatu dasar hukum;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi harus mempertimbangkan pihak yang disidik oleh penyidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan itupun apa yang disidik dan dituntut harus dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 juncto 184 KUHAP. Oleh karena itu, dikarenakan 14 perusahaan dalam Asian Agri Grup bukanlah merupakan pihak yang disidik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat dikatakan Majelis Hakim Kasasi hanyalah melakukan tindakan meniti buih dalam arti melakukan suatu tindakan apriori yang sama sekali tidak legitimate;

Bahwa dengan demikian, putusan kasasi Mahkamah Agung tidak ada suatu ratio legis karena tidak ada pertimbangan hukum yang cukup (Onvoedoende Gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dilakukan eksekusi (non executable) terhadap yang tidak didakwakan dalam hal ini ke 14 perusahaan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi;

D. Dasar Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dipakai Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu Pasal 13 ayat (5) UU KUP;

Bahwa apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU KUP disebutkan bahwa:

“Dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu sepuluh tahun sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dilampaui.



Dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, terungkap adanya data fiscal yang selama itu sengaja tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.”;

Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan Negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak;

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak;

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui;

Dalam Penjelasan tersebut telah sejelas-jelasnya dijelaskan bahwa penerbitan SKPKB yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya yang diajukan ke pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) tersebut adalah sesuai dengan prinsip *Ultimum Remedium*;

E. Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan Pajak

Bahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi, pos-pos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan selain hanya mengatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun melakukan permohonan secara resmi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak dua kali setelah SKP diterbitkan dan sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan, namun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapatkan jawaban bahwa SKP diterbitkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanpa memberikan perincian koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak;

Bahwa pada Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kembali meminta detail perhitungan dari Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan. Karena sudah jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan prosedur penerbitan SKP berdasarkan Undang-Undang KUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melihat adanya SKP yang dikecualikan untuk dapat diberikan detail perhitungan dan pos-pos yang dikoreksi. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melihat jika SKP tersebut terbit dengan prosedur normal, maka sudah menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Wajib Pajak yang harus diberikan seluruhnya apa yang menjadi hak Wajib Pajak tanpa perkecualian. Jadi SKP ini adalah SKP biasa dan bukan karena Putusan MA walaupun angkanya sama persis. Dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan meminta detail Perhitungan Putusan Mahkamah Agung karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan terdakwa namun permintaan detail perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu mengikuti alur prosedur pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU KUP, yaitu detail perhitungan SKP; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui dan tidak pernah diberikan informasi mengenai perincian Dasar



Pengenaan Pajak dalam penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 dengan dasar Putusan Mahkamah Agung. Maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat mengetahui secara pasti apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memperhitungkan koreksi yang telah dilakukan sebelumnya tersebut sehingga tidak terjadi dua kali koreksi atas hal yang sama. Dan yang harus menjadi pertanyaan Majelis Hakim Agung yang Terhormat dan semua pihak adalah dimana letak keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi hak dari semua Wajib Pajak? Apakah pajak boleh ditagihkan dengan cara yang semena-mena oleh otoritas terkait dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)?;

Bahwa lebih lanjut, jika memang merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung maka sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menunjukkan dasar hukum atau perintah di putusan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di perintahkan untuk menerbitkan SKP. Dan kalau ini dinyatakan bahwa bukan SKP biasa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberikan prosedur penerbitan SKP dan Keputusan Keberatan yang tidak biasa (dikecualikan). Karena sepanjang pengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jika terbit SKP dan atau SKPKB maka prosedur yang digunakan adalah UU KUP dan peraturan pelaksanaannya beserta seluruh hak dan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak sebagaimana yang telah disampaikan berulang kali oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam semua persidangan di Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjawab bahwa dasar perhitungan Surat Ketetapan Pajak adalah Putusan Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung, perhitungan tersebut dikutip dari hasil pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*);

Bahwa dalam Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, perhitungan yang dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, sehingga tidak dapat digunakan untuk menerapkan besarnya kerugian pada



pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak;

F. Contoh Kasus Tiara Dewata Group

Bahwa dalam persidangan PT Hari Sawit Jaya yang dilaksanakan oleh Majelis I, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mempelajari kasus sengketa pajak Tiara Dewata Group. Berikut adalah analisa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kasus tersebut:

1. Di dalam sengketa pajak tersebut, Tiara Dewata Group mengajukan gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/WPJ.17/2012 tanggal 9 April 2012 tentang Penolakan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB Nomor 00031/206/05/904/10 tanggal 15 September 2010;
2. Dalam menerbitkan SKPKB, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP yang mengatur bahwa *“Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”*;

Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwa yang dimaksud dengan *“keterangan lain”* adalah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dijadikan keterangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007,



Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuat hukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi;

3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;
4. Bahwa dibawah ini adalah pokok-pokok perbedaan antara kasus Tiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

Kasus Tiara Dewata Group	Kasus Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
1. Yang menjadi terdakwa dalam putusan pidana Tiara Dewata Group adalah Direktur yang menandatangani SPT dan Wakil Komisaris yang merupakan penanggung jawab bagi Perusahaan.	1. Yang menjadi terdakwa dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 adalah sdr. Suwir Laut yang bukan merupakan karyawan dan pengurus yang menjadi penanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
2. Di dalam proses persidangan pidana Tiara Dewata Group membahas masalah perhitungan Pajak Terutang.	2. Di dalam proses persidangan pidana Pemohon Banding, tidak pernah membahas mengenai perhitungan Pajak Terutang. Namun dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 diputuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus membayar denda sebesar 2 kali pajak terutang.
3. SKPKB yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kasus Tiara Dewata Group memiliki dasar perhitungan yang perhitungan yang jelas dimana terdapat nilai pendapatan, biaya dan memperhitungkan kredit pajak yang telah dibayar dan tidak semata-mata hanya berasal dari perhitungan pengadilan.	3. SKPKB yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya terdapat nilai pajak yang masih harus dibayar dan sanksi administrasi tanpa memperhitungkan nilai pendapatan, biaya dan kredit pajak yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayar.
4. Atas SKPKB yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Tiara Dewata Group mengajukan permohonan	4. Atas SKPKB yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas SKPKB



<p>pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar karena dalam sengketanya Tiara Dewata Group hanya memperlakukan formal penerbitan SKP yang di dasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri sedangkan Putusan MA untuk kasus yang sama menghasilkan angka yang berbeda.</p>	<p>tersebut dengan alasan bahwa selain Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperlakukan formal penerbitan SKPKB, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memperlakukan materi koreksi yang menjadi dasar penerbitan SKPKB tersebut. Hal ini disebabkan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendapatkan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan detail perhitungan hasil verifikasi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan SKPKB tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat mengetahui apakah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkan hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas kredit pajak yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bayarkan dalam perhitungan SKPKB tersebut.</p>
---	---

Bahwa berdasarkan Tabel perbandingan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari Kasus Tiara Dewata Group, adalah sebagai berikut:

- Kasus Tiara Dewata Group ini tidak dapat dijadikan suatu perbandingan langsung dengan Kasus yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan. Untuk melakukan analisa atas kasus Tiara Dewata Group, maka harus dilakukan perbandingan sesuai dengan tabel di atas.
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, kembali tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum meskipun Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelas secara nyata telah melanggar hukum dan prosedur yang berlaku, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Banding *a quo* telah menyatakan bahwa permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dinyatakan ditolak melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61342/PP/M.XVIA/13/2015 tanggal 26 Mei 2015;



- Bahwa mengingat fakta hukumnya adalah bahwa dalam hal ini tindakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Majelis Hakim telah menyebabkan ketidakpastian mengenai upaya hukum apa yang seharusnya ditempuh oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga mengingat hukum pajak adalah hukum publik yang bersifat memaksa dan memberi beban maka sesuai dengan asas kepastian dan keadilan adalah wajar apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berhak memilih upaya hukum yaitu mengajukan peninjauan kembali;

VIII. Pembahasan

Bahwa terdapat fakta-fakta fundamental yang mendasari kekeliruan penerbitan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61342/PP/M.XVIA/13/2015 tanggal 6 Mei 2015, yaitu sebagai berikut:

- 1 Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, telah mengabaikan dalil-dalil/penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), mengabaikan bukti-bukti yang ada dan akhirnya telah nyata-nyata salah dalam mengambil dan menafsirkan dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan. Sehingga dalam putusan Majelis Hakim *a quo* telah terjadi *error in facti* dan *error in juris* yang menghasilkan putusan *contra legem* (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan melanggar asas keadilan dan kepastian dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menguraikan dalil-dalilnya untuk membuktikan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara rinci dengan menggunakan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu sebagai berikut:
“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;
- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 136 angka 12, yang menyebutkan:
12.bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon mengakui telah melakukan pembayaran sanksi pidana sebesar 50% x denda yang



disebutkan dalam amar Putusan MA yaitu dua kali pajak terutang untuk tahun pajak 2002 sebagai berikut:

PPh Pasal 26 Rp7.507.951.356.09,-

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pertanggungjawaban membayar denda pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* diakui sebagai tanggung jawab Pemohon;

TANGGAPAN:

Bahwa pembayaran sanksi pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukanlah merupakan pengakuan pertanggungjawaban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap perbuatan Suwir Laut selaku Tax Manager Asian Agri Grup, melainkan sebagai bentuk itikad baik dan patuh kepada hukum walaupun putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara (*due process of law*) sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum dan tidak dapat dieksekusi terhadap 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) termasuk Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan putusan yang bersifat penjatuhan penghukuman pemidanaan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14b, 14c dan 14f KUHP;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak seharusnya memutarbalikkan keadaan dengan menggunakan hal ini sebagai alasan untuk membuat asumsi bahwa pertanggungjawaban membayar denda pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung *a quo* diakui sebagai tanggung jawab Pemohon;

Bahwa sudah sangat jelas disampaikan oleh Pemohon Banding dan diperkuat oleh keterangan ahli dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Margarito dalam persidangan terbuka selama di Pengadilan Pajak bahwa syarat yang dicantumkan di dalam Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor tersebut bukanlah hal yang dapat dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam arti bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pembayaran tersebut maka tidak ada sanksi bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

- 4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 136-137 angka 13, yang menyebutkan:



13.bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyebutkan Suwir Laut adalah selaku individu bertanggung jawab sendiri selaku individu atas perbuatannya dan juga bukan sebagai orang yang diberikan kuasa untuk atas nama pengurus perusahaan Pemohon. Oleh karena itu membebaskan pertanggung jawaban perbuatan Suwir Laut kepada Pemohon adalah tidak beralasan hukum, menurut Majelis pendapat Pemohon tersebut keliru, karena menurut Putusan MA a quo telah terbukti unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yang antara lain menyebutkan bahwa Terdakwa selaku tax Manager pada 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group (AAG) yang diwakilinya mempunyai kewajiban mengisi dan menyampaikan laporan SPT tahunan Pajak Pasal 26 dan Penghasilan berdasarkan pembukuan akhir tahun (lihat halaman 470 Putusan MA poin Ad 3). Bahwa pada poin Ad 5 Putusan MA halaman 471 disebutkan: "bahwa pengisian SPT yang dilakukan Terdakwa untuk 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2002 dapatlah dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa pertimbangan MA ini adalah menjadi bukti Suwir Laut adalah organ dari Badan Hukum. Bahwa majelis sependapat dengan dalil Terbanding mengenai bukti sempurna. Putusan MA merupakan bukti sempurna (probatio plena) bagi Terbanding. Sejalan dengan pendapat Terbanding tersebut Majelis memandang Terdakwa terbukti sebagai wakil atau orang yang mewakili 14 perusahaan untuk mengisi SPT Tahunan Pajak dan dari 14 perusahaan dimaksud termasuk atas nama Pemohon Banding sendiri:

TANGGAPAN:

Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan bukti sempurna (probatio plena) bagi Terbanding, sesungguhnya hal tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut merupakan putusan yang melanggar Hukum Acara Pidana (Criminal Procedure/ *due process of law*) sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 merupakan putusan yang mengandung



kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat kasasi karena:

1. Sebelum menguraikan lebih lanjut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding mengutip kutipan berikut ini: *“Geef me goede rechter, goede Rechter Commissarissen, goede officieren van justitie en goede Politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken (Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik)- Taverne”;*

2. Menurut pendapat Prof. Mr. Dr. Strijards sebagaimana dikutip oleh Prof. Andi Hamzah, sebagai berikut:

“Prof. Mr. Dr. Strijards, pada tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kejaksaan di Den Haag, mengatakan kepada kami (delegasi Kejaksaan Agung, yang diikuti juga oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dan Dr. Aziz Syamsuddin dari Komisi III DPR), bahwa Hoge Raad Nederland tidak menjatuhkan pidana, yang menjatuhkan pidana hanya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Gerechtshof). Dengan demikian, Hoge Raad sebagai badan peradilan tidak pernah memutuskan: “menimbang, dan seterusnya ... membatalkan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan mengadili sendiri.” Hal ini logis, karena Hoge Raad sama dengan Mahkamah Agung Indonesia tidak memeriksa judex facti tetapi hanya judex juris, sedangkan pembuktian suatu perkara ada di ranah judex facti.”

(Dikutip dari Kata Pengantar Prof. Andi Hamzah, S.H. pada buku E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publishing, 2012, halaman ix-x.);

3. Bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan



pihak yang menjadi terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;

4. Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, JPU tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah dijadikan Terdakwa. Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011, JPU hanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak sebagai pihak yang didakwa dan sama sekali tidak mencantumkan keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa di dalam dakwaannya.

Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudah jelas tidak pernah mencantumkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalam pertimbangannya justru menyatakan sebagai berikut:

bahwa Mahkamah Agung menyadari bahwa gagasan menuntut pertanggung jawaban pidana korporasi belum diterima seutuhnya karena alasan yang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan, namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggung jawaban seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional bahwa perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggung jawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan Negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan telah perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:

"3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan



setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

- 4) *Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”;*

Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kata “harus” pada kalimat “Musyawarah Hakim *harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.*” Perlu dicermati bahwa terdapat kata “dan” di antara kalimat “*harus didasarkan atas surat dakwaan*” dengan kalimat “*segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang*” yang berarti keduanya harus terpenuhi;

Pasal 182 KUHAP telah menguraikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim hanya dapat memutus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Penerapan Pidana terhadap 14 Perusahaan yang tergabung dalam AAG yang tidak pernah disebutkan sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan serta tidak pernah pula diadili, seharusnya tidak merupakan suatu penerapan yang secara otomatis ada dalam suatu putusan pengadilan, walaupun tidak didakwakan. Tanpa didakwakan, penerapan pidana tersebut tidaklah dapat dipertimbangkan, apalagi untuk diputuskan;

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*” Penerbit Sinar Grafika, edisi kedua, halaman 389, menyatakan bahwa:

”Fungsi utama surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan ”landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa”. Berdasar rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan.....Padahal semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, mesti terikat pada rumusan surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.”;



Bahwa surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan;

Prof. Andi Hamzah, S.H. dalam artikelnya "Sistem Peradilan Pidana Terpadu", yang dimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 Nomor 7 Tahun 2003, halaman 12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan hakim bebas dalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yang didakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistem peradilan pidana terpadu mensyaratkan instansi penegak hukum saling kontrol dan semua independen;

Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya "Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Pustaka Ilmu, 2012, halaman 121-123 menyatakan sebagai berikut:

"Dilihat dari aspek prosedural "surat dakwaan" memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, selain sebagai opening statement dari Jaksa/Penuntut Umum sebelum mengajukan tuntutan, dakwaan juga dijadikan sebagai acuan dasar bagi Hakim untuk menentukan arah pemeriksaan perkaranya.";

Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi dalam perkara *a quo*, dalam bukunya yang lain berjudul "Pembuktian Dalam Hukum Pidana", Pustaka Ilmu, 2012, halaman 57-58 menyatakan sebagai berikut:

"Jika kita perhatikan proses pemeriksaan perkara pidana dipersidangan dengan mendasarkan surat dakwaan maka pada dasarnya akan merefleksikan interaksi tiga titik kepentingan yaitu:

1) *Sisi kepentingan Jaksa/Penuntut Umum*

Surat dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam sidang Pengadilan, Proses selanjutnya dakwaan menjadi dasar pembahasan yuridis, sebagai dasar penuntutan yang kemudian merupakan dasar untuk menentukan upaya hukum yang tetap terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

2) *Sisi kepentingan Hakim*

Bagi Hakim surat dakwaan dapat menjadi pedoman arah pemeriksaan perkaranya sekaligus akan memberikan limitasi



(pembatasan) dimensi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan proses pengambilan putusan untuk menentukan terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan selanjutnya menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa sebagai klimak hasil pemeriksaan perkaranya.

3) Sisi kepentingan Terdakwa/Penasihat Hukum

Surat dakwaan dapat merupakan dasar untuk menyampaikan nota keberatan (eksepsi), mempersiapkan pembelaan, sebagai dasar pembahasan yuridis penyusunan memori banding, memori kasasi dan atau upaya hukum lainnya.”;

Dengan demikian ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan:

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
 - b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
 - c) Bagi Terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.”;
6. Suatu penghukuman yang melibatkan subjek hukum yang tidak didakwa dan tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil adalah pelanggaran hukum yaitu *due process of law*.

Bahwa hal sebagaimana tersebut di atas, didukung oleh adanya pendapat sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, Guru Besar (EM) Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran:
 - a. pada artikel “Kejahatan Korporasi” yang dimuat di Harian Kompas tertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung baru-baru ini dalam kasus PT Asian Agri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaan penuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yang dituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp2,7 triliun kepada PT AA.



Apakah Putusan MA ini merupakan “terobosan hukum” atau “pelanggaran hukum”, kiranya perlu diskusi para ahli sebelum putusan telanjur dipandang sebagai preseden yang memenuhi keadilan atau justru melanggar prinsip due process of law.”;

- b. pada artikel “Putusan Mahkamah Agung Dinilai tidak berdasar” yang dimuat di Harian Media Indonesia tertanggal 13 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“Atas putusan kasasi MA itu, mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM menilai terjadi error in persona atau suatu dakwaan/gugatan dialamatkan kepada orang yang salah. Oleh karena itu, menurut Romli, aset perusahaan tidak boleh disita karena tidak terkait.

Romli menambahkan, Putusan MA tersebut non executable atau tidak berdasar karena dari 14 perusahaan yang bernaung di bawah Asian Agri Group, 8 perusahaan sudah membayar pajak, sedangkan 6 perusahaan masih dalam proses penyelesaian pajak. Bahkan Putusan MA itu bisa jadi preseden buruk di masa depan.”;

2. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, pada artikel “Kriminalisasi Korporasi Ancam Iklim Investasi” yang dimuat di Harian Rakyat Merdeka tertanggal 19 Juli 2013, menyatakan pendapatnya yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip sebagai berikut:

“... Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayar denda pajak sebesar Rp2,5 triliun terhadap perusahaan perkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Laut yang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.

Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut, sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa denda maupun ganti kerugian. Putusan itu sangat keliru penerapan hukumnya.”;

7. Bahwa putusan Majelis Hakim di tingkat Kasasi melanggar ketentuan Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*



(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak



mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;

- (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
 5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
 6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
 7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.
 8. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko yang juga Ketua Majelis Hakim Agung dan Mantan Hakim Agung Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja dalam perkara Nomor



2239 K/PID.SUS/2012 tersebut dalam memberikan pendapat terhadap putusan hakim praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan, yang intinya sebagai berikut:

Djoko Sarwoko:

Putusan itu sebenarnya menyimpang dari KUHPA karena pasal 77 sudah mengatur secara jelas objek praperadilan. Kemudian di hukum Acaranya diatur di pasal 80 dan 83. Jadi kalau putusan keliru seperti itu secara hukum tidak bisa dilaksanakan;

(Sumber: <http://m.antaranews.com/berita/480392/mantan-hakim-ma-nilai-putusan-praperadilan-langgar-kuhp>);

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Djoko, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan praperadilan Budi Gunawan. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim praperadilan Budi Gunawan telah melanggar ketentuan KUHPA;

(sumber:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e1aae4befc3/hakim-lampau-kewenangan-putusan-praperadilan-bg-batal-demi-hukum>);

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja:

“Putusan Sarpin bukan penemuan hukum tapi unprofessional conduct alias bodoh atau kemasukan angin.”;

“Penafsiran dalam hukum acara pidana sangat terbatas. Hukum acara pidana menjalankan hukum pidana materil dan harus dijalankan untuk menjamin kepastian hukum. Penafsiran hanya historis interpretasi atau sistematis.”;

(sumber:<http://news.detik.com/read/2015/02/20/082010/2837746/10/prof-dr-komariah-menelukung-uu-hakim-sarpin-bodoh?nd771104bcj>);

9. Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali (PT Indo Sepadan Jaya) dengan itikad baik dan patuh kepada hukum melakukan pembayaran syarat khusus yang tercantum dalam amar putusan tersebut dimana seyogyanya menurut ketentuan Pasal 14 a, b, c, dan f ayat (1) KUH Pidana, apabila syarat umum atau khusus tidak dipenuhi maka hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan



putusan-dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana. *Vide* Buku Lembaga Pidana Bersyarat, Prof. Dr. Muladi, S.H., halaman 64;

Dengan demikian pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai *ultimum remedium*. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*);

- 5 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 137-138 angka 13-17, yang keliru mengartikan pertimbangan hukum yang disebutkan sebagai berikut:

13. bahwa badan hukum adalah subjek hukum subjek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia tidak mempunyai "*central bewustzijn*" oleh karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa (*naturlijke personen*). Orang yang diberikan wewenang mewakili



badan hukum orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dan atas nama badan hukum. Adapun orang-orang yang bertindak tetapi untuk dan atas nama badan hukum ini disebut organ atau alat kelengkapan seperti pengurus direksi dan sebagainya dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu. Orang yang bertindak selaku organ itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban gugat badan hukum. Sepanjang tindakannya masih dalam batas-batas wewenang yang dimilikinya. Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan memang tidak menjadi tanggung jawab badan hukum tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya;

14. bahwa menurut DR. Andi Hamzah yang ditulis dalam makalah Seminar IKAHI tanggal 27 Maret 2013 di Ancol, dalam hukum perdata Pasal 1367 BW (*burgerlijke wetboek*) pegawai biasa jika berbuat atas nama korporasi yang menimbulkan kerugian dalam perbuatan Bahan Berbahaya Beracun (B3);

bahwa kewajiban korporasi bertanggung jawab pidana berlaku dalam teori hukum pidana sebagai "*Vicarious Liability*" dan "*Strict Liability*" hanya berlaku untuk tanggung jawab perdata jika dalam kegiatan dipakai B3, dalam hukum perdata sudah diterima prinsip "*Strict Liability*" artinya tanggung jawab tidak langsung tetapi pasti karena kaitan masalah dengan induknya;

bahwa menurut Dr. Muladi, S.H. Guru besar Hukum dalam makalah di harian Kompas tanggal 17 February 2011, yang berjudul "Standar Pembubaran Ormas Anarkis" dalam perkembangannya, sanksi pidana korporasi sesungguhnya tidak asing lagi dalam hukum pidana, yang dijatuhkan bervariasi bisa berupa sanksi pidana denda administrasi, dibekukan, dibubarkan, ditempatkan dalam pengawasan sanksi perdata: penyitaan asset, ganti rugi dalam pidana perpajakan denda terhadap kerugian pendapatan Negara. Hal ini didasarkan atas teori "identifikasi" yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang dapat diidentifikasi dengan organisasi,



karena kewenangannya yang strategis, dalam korporasi dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan korporasi sebagai suatu kesatuan. Menurut teori “Kepelakuan Fungsional” korporasi sebagai suatu sistem harus dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan fungsi sosial dari korporasi yang semakin luas dalam sistem kehidupan masyarakat modern yang merupakan personifikasi dari tindakan bersama para pengurusnya;

15. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta sempurna berupa Putusan Mahkamah Agung itu, Majelis menilai Suwir Laut terbukti sebagai orang yang mewakili 14 perusahaan mengisi SPT Tahunan Pajak Pasal 26 tahun 2002 termasuk atas nama Pemohon yang isinya tidak benar, dan harus dinilai perbuatan Suwir Laut selaku organ badan usaha telah disetujui oleh organ yang kedudukannya lebih tinggi, karena SPT 14 korporasi tersebut terbukti telah ditandatangani oleh masing-masing korporasi selaku organ yang lebih tinggi yang mempunyai batas-batas kompetensi untuk itu. Dan SPT Tahun Badan ke-14 korporasi tersebut terbukti telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Laporan Pajak Penghasilan Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2002;

16. Bahwa menurut Paul Scholten berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (BW) (*ibid.* halaman 65);

“Organ yang bertindak masih berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) Badan Hukum tetap bertanggung jawab;

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertanggung jawaban Badan Hukum seperti Pemohon terhadap perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana maupun menurut hukum perpajakan dari Suwir Laut harus dinilai Suwir Laut sebagai Organ Badan Hukum yang bertindak mewakili Pemohon karena perbuatannya telah disetujui oleh Organ Badan Hukum yang kedudukannya lebih tinggi yang mempunyai batas-batas kompetensi untuk itu, karna Pemohon sebagai suatu sistem harus dapat dipertanggungjawabkan sehubungan dengan fungsi sosial dari korporasi yang semakin luas dalam sistem kehidupan modern yang merupakan personifikasi dari tindakan bersama para pengurusnya;



TANGGAPAN:

1. Bahwa berkenan dengan pertimbangan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga memahami adanya perkembangan dalam teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut UU (*Strict Liability*) maupun Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) yang bertitik tolak dari doktrin "*respondeat superior*";
Namun demikian, Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mengartikan Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam perkara pidana pajak maupun banding pajak, oleh karena UU KUP sendiri tidak pernah menganut doktrin tersebut;
2. Penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Hukum Pidana di Indonesia sampai saat ini hanyalah pada sektor-sektor tertentu yang belum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Padahal yang diterapkan dalam pengadilan adalah kaedah yang sudah merupakan bagian dari hukum positif bukan suatu "karakter" atau analisa yang statusnya masih berupa wacana dari seseorang dalam hal ini tindak pidana pajak. Semua wacana yang ada tentang kedudukan Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) ini harusnya melewati tahapan legislasi terlebih dahulu untuk selanjutnya dirumuskan dalam perundang-undangan pajak yang berlaku dewasa ini;
3. Penerapan *Vicarious Liability* dalam perkara Suwir Laut bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP (PP Nomor 27 Tahun 1983), tujuan Hukum Acara Pidana adalah: Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;
4. Profesor Muladi, S.H., dalam memberikan keterangan ahli di persidangan pengujian penerapan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 56/PUU-IX/2011) menyatakan, Hukum acara



pidana merupakan batas-batas pembenar untuk membatasi *abuse of power* dalam menerapkan konsep *total enforcement*;

5. Menurut Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana; Dengan demikian KUHAP masih mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam menjatuhkan pembedanaan;
- 6 Sebagai bahan perbandingan, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia memang telah menganut Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*Strict Liability*). Namun demikian, penerapan doktrin tersebut memang secara nyata-nyata telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup sehingga merupakan ketentuan khusus yang menyimpangi ketentuan umum dalam pidana;
- 7 Pendapat Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi terhadap perkara Suwir Laut bahwa Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) berlaku dalam Hukum Pidana di Indonesia meskipun belum dinyatakan berlaku oleh suatu peraturan perundang-undangan merupakan penerapan yang keliru dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa *Vicarious Liability* adalah pembebanan tanggung jawab pidana kepada Korporasi, sedangkan pengertian "*mensrea*" adalah suatu sikap bathin, yaitu apa yang ada dalam bathin seseorang, dan apa yang ada dalam bathin seseorang merupakan hasil dari proses cipta, rasa dan karsa (kehendak atau keinginan) orang tersebut;

Niat seseorang, yang ada dalam bathinnya untuk melakukan tindak pidana misalnya membunuh adalah hasil akhir proses dari perpaduan pikirannya (cipta), perasaannya dan karsa atau kehendaknya (keinginan), yaitu kehendak untuk membunuh. Dengan demikian "*mensrea*" terdapat dan melekat dalam diri seseorang oleh karena itu konsekwensinya adalah bahwa hanya sesuatu memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Oleh karena hanya manusia yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak dibebani tanggung jawab pidana;

Akan tetapi jika pengertian *mensrea* dikaitkan dengan teori *vicarious liability*, maka timbul pertanyaan bagaimana membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi karena sebagaimana



diketahui pertanggung jawaban pidana mensyaratkan adanya unsur “*mensrea*”;

Hal itu dijawab oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut dengan mengatakan: “*sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena “mensrea” dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau “mensrea” dari 14 (empat belas) korporasi*”;

Dengan demikian, disini Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut berpendapat bahwa “*mensrea*” pada diri Terdakwa Suwir Laut adalah juga merupakan *mensrea* dari 14 korporasi AAG, yaitu 1) PT. Dasa Anugrah Sejati, 2) PT Raja Garuda Mas Sejati, 3) PT. Indo Sepadan Jaya, 4) PT. Indo Sepadan Jaya, 5) PT. Nusa Pusaka Kencana, 6) PT. Andalus Intiagro Lestari, 7) PT. Tunggal Yunus Estate, 8) PT. Rigunas Agri Utama, 9) PT. Rantau Sinar Karsa, 10) PT. Supra Matra Abadi, 11) PT. Mitra Unggul Pusaka, 12) PT. Hari Sawit Jaya, 13) PT. Inti Indosawit Subur dan 14) PT. Gunung Melayu. Artinya bahwa sikap bathin terdakwa telah *bermetamorphosa* menjadi sikap bathin korporasi sehingga atas dasar itu Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut membebaskan tanggung jawab pidana kepada 14 korporasi dalam AAG, dalam bentuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar;

- 8 Bahwa jika mengikuti alur pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tersebut, maka yang harus dibuktikan adalah apakah ada sikap bathin, niat dan kehendak yang dimaknai sebagai ‘*mensrea*’ dari 14 korporasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti didakwakan yaitu; “*dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*”;
- 9 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa UU KUP mengakui 2 (dua) macam Wajib Pajak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 butir 1 UU KUP yang menyebutkan “*Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-*



undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu". Terhadap setiap Wajib Pajak melekat hak dan kewajiban yang diatur secara limitatif oleh UU KUP. Salah satu kewajiban wajib pajak tersebut adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri. Ketentuan Pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib pajak tersebut hanya diberikan satu NPWP dimana NPWP tersebut merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

10 Bahwa bila kita memperhatikan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Suwir Laut, pada bagian I yaitu tentang Identitas Suwir Laut disebutkan Pekerjaan Suwir Laut adalah Tax Manager AAG. Kemudian, pada bagian selanjutnya dinyatakan bahwa Suwir Laut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Padahal Surat Pemberitahuan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah SPT Tahunan PPh WP Badan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG;

Hal inilah kemudian menjadi sesuatu yang keliru, untuk mempermasalahkan *"SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atas nama PT Indo Sepadan Jaya dengan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU KUP"* kepada Suwir Laut selaku Terdakwa dengan NPWP sebagai seorang pribadi dan memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang tersendiri pula;

11 Bahwa Pasal 32 UU KUP menyatakan bahwa *"dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: (a) badan oleh pengurus, ...dan seterusnya "*. Suwir Laut bukan merupakan Pengurus ataupun pihak yang mewakili 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dalam perkara ini;

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini;

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;

12 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pertimbangan:

a. putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali perkara Nomor 125 PK/Pid/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa suatu tindak pidana bersifat individual dalam arti belum tentu apa yang dilakukan oleh anak buah dapat juga dikenakan kepada atasannya.”;

b. putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi perkara Nomor 1364 K/Pid.Sus/2011 tanggal 9 Agustus 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa tidak ditariknya korporasi ke dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan karena Terdakwa justru sebagai Kuasa Direksi CV adalah bertanggung jawab secara fungsional”;

13 Bahwa Suwir Laut bukan merupakan pengurus atau Direksi atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan merupakan kuasa Direksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan juga bukan penerima kuasa dari Direksi sehingga dengan demikian tindakan atau perilaku Suwir Laut tidak dapat dibebankan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Suwir Laut selaku Tax Manager bukan merupakan Organ Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak dapat dinilai perbuatan Suwir Laut telah disetujui oleh organ yang kedudukannya lebih tinggi karena Suwir Laut tidak akan mungkin memiliki *mens rea* yang sama dengan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG dan perbuatannya tidak dapat dinilai telah disetujui oleh organ Badan Hukum yang kedudukannya lebih tinggi, kecuali 14 perusahaan tersebut telah diadili terlebih dahulu sebelum Suwir Laut diperiksa guna mengetahui apa yang menjadi sikap bathin, niat dan kehendak 14 perusahaan tersebut. Dalam perkara *a quo*, 14 perusahaan tersebut tidak pernah dijadikan Terdakwa oleh JPU.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 138-140 angka 18-27, sebagai berikut:

18. *Bahwa Majelis memandang disamping pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diputus oleh MA, masih ada tanggung jawab perpajakan yang belum diselesaikan karena terbuktinya ada data pajak yang digelapkan tersebut dan belum dipertanggungjawabkan menurut ketentuan perundang-undangan Perpajakan yaitu pajak-pajak yang masih harus dibayar menurut UU PPH baik PPh Pasal 26 maupun PPH Pasal 26 tahun pajak 2002;*

19. *bahwa dalam Putusan MA disebutkan sebagai potensi kerugian Negara yang dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara sebagai denda pidana perpajakan, adalah merupakan bukti sempurna dan dinilai dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang masih harus dibayar menurut per Undang-Undang Perpajakan yang berlaku;*

15. *bahwa berdasarkan pendapat Ahli perpajakan Sunarto halaman 445 Putusan Mahkamah Agung, asas "Rechtshandhaving" yang dianut dalam penegakan hukum perpajakan yaitu prinsip yang mencerminkan tindakan hukum dengan memaksimalkan dan mendahulukan sanksi administratif sebagai usaha untuk menimbulkan perbaikan dan kepatuhan (reparatoir) dibandingkan dengan melaksanakan tindakan*



hukum pidana yang akan memberikan nestapa bagi wajib pajak. Pertimbangan Mahkamah Agung halaman 449 sebagai berikut: Prof. Maria Panda Indriati Soeprati (Ilmu Perundang-undangan, 2007) menyatakan bahwa norma hukum undang-undang perpajakan bersifat heteronoom, artinya: datangnya kewajiban membayar pajak dari negara sehingga paksaan datang dari negara agar orang senang atau tidak senang harus membayar pajak. Pidana dalam perundang-undangan perpajakan diperlukan dalam pemungutan pajak, diperlukan untuk melindungi kepentingan umum para pembayar pajak yang patuh melaporkan SPT dan keterangan yang benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mencegah sebagai tindakan preventif dan peringatan dini (deterrent effect) pada para potensial penyelundup pajak agar tidak terjadi meluasnya pelaporan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga merugikan penerimaan negara. Kepada mereka yang ternyata telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan maka berdasarkan teori relative atau tujuan (doeltheorie) atau penjeraman, perbaikan dan perlindungan kepatuhan pembayar pajak diperlukan pemberian sanksi pidana;

20. bahwa cerminan asas ini terbukti ketika melakukan tindakan pemeriksaan pajak mula mula kepada Pemohon dilaksanakan pemeriksaan dengan cara biasa, berdasarkan alasan dan kesimpulan yang jelas lalu pemeriksaan dengan cara biasa ditingkatkan dengan pemeriksaan bukti permulaan, dan pada akhirnya sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dilakukan tindakan penyidikan pajak terhadap Pemohon. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Terbanding, bila dengan kemauan sendiri wajib pajak dapat membetulkan dan membayar kekurangan pajaknya ditambah dengan sanksi administrasi menurut ketentuan perpajakan yang berlaku yang dihitung dari perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut perhitungan DJP kepada WP walaupun penagakan hukumnya telah dialihkan oleh DJP kepada Jaksa Agung, demi asas kepatuhan (reaparatoir) dan kepentingan penerimaan Negara masih diberikan kesempatan berdasarkan ketentuan Pasal 44B UU KUP/Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dengan permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan tuntutan pidana oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum). Bahwa menurut fakta persidangan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang itu tidak dimanfaatkan oleh Pemohon karena terbukti



tidak menempuh jalan dengan melakukan tindakan penyelesaian secara hukum administratif terlebih dahulu. Oleh karena itu kewenangan penegakan sanksi administratif demi hukum dan demi kepentingan penerimaan Negara dengan alasan dan motivasi yang jelas oleh Terbanding ditunda pelaksanaannya dan tuntutan pidana sudah seharusnya dilanjutkan sampai dengan putusan pidana diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan (asas premium remedium);

- 21. Bahwa memperhatikan rangkaian proses penegakan sanksi administrasi perpajakan yang tertunda tersebut Majelis menilai hal tersebut adalah tindakan hukum yang sesuai dengan asas yang dianut dalam perundang-undangan perpajakan, selanjutnya terhadap pertanggungjawaban pajak Pemohon yang kedudukannya sebagai wajib pajak badan dan bukan terhadap pertanggungjawaban pajak Suwir Lut yang kedudukannya selaku wajib pajak orang pribadi, namun penegakan sanksi hukum terhadap perbuatan Suwir Laut yang berkapasitas sebagai organ badan hukum atau yang mewakili kepentingan Pemohon terhadap kewajiban pajak yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak PPh Badan dan PPh 26 tahun pajak 2002 menurut penalaran hukum yang logis penerbitan SKPKBT sudah seharusnya terhadap Pemohon sebagai wajib pajak badan;*
- 22. bahwa berdasarkan asas "insingular" dalam delik pidana perpajakan, penegakan sanksi pidana dapat bersama-sama dengan penegakan administratif;*
- 23. bahwa disamping itu menurut teori "melebur" disebutkan prinsip yang dianut dalam sistem penegakan hukum, bilamana disamping terdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya menurut hukum perdata atau sanksi administrasi menurut hukum perpajakan dll, berdasarkan prinsip melebur penegakan hukum dapat dilakukan bersama-sama dan dapat juga dilakukan berturut-turut;*
- 24. bahwa berdasarkan asas "kumulatif internal" dan "kumulatif eksternal" dalam sistem penegakan hukum terdapat sanksi dengan jenis-jenis sanksi yang berbeda, missal: ada sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi perpajakan maka dalam cerminan penerapan prinsip ini dapat dilakukan bersama-sama atau tidak bersama-sama. Karena misalnya jenis sanksi pidana dengan jenis sanksi perdata atau jenis sanksi administrasi menurut ketentuan hukum perpajakan masing-*



masing mempunyai tujuan dan karakter yang berbeda-beda maka sanksi pidana ditegakkan lebih dulu lalu kemudian sanksi lainnya (Philipus M. Hadjon);

25. *bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Terbanding dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP karena dalam ketentuan tersebut telah mencerminkan prinsip tentang kewenangan Terbanding mengaih kembali pajak-pajak yang telah terbukti Di Pengadilan digelapkan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga telah menjadi Putusan Pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat wajib pajak yang bersangkutan;*

26. *bahwa menurut Majelis dengan putusan Mahkamah Agung a quo yang dipidana dengan pidana kurungan dan ditambah kewajiban membayar denda pidana sebanyak dua kali perhitungan pajak yang menjadi kerugian Negara, hal tersebut tidaklah menghapuskan hak eksekusi penetapan dari Terbanding sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP untuk menagih kembali pajak yang masih harus dibayar menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;*

Oleh karena perhitungan pajak yang telah menjadi dasar penghitungan bagi Mahkamah Agung untuk menentukan denda pidana sesuai dengan ketentuan pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP, maka demi kepentingan penegakan hukum menurut ketentuan perpajakan dan selanjutnya berdasarkan asas kepastian hukum sebagai upaya penegakan sanksi administrasi perpajakan yang semula tertunda karena penegakan sanksi pidana a quo, terhadap kewajiban pajak Pemohon tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU KUP atas kewajiban pajak dimaksud dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan harus ditetapkan terlebih dahulu hak hak dan kewajiban pajak Pemohon sehingga dengan demikian Terbanding telah menegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dan bilamana dalam proses penetapan pajak tersebut disampaing data yang terungkap dalam Putusan MA ada data lain selain daripada data sempurna dimaksud, menurut ketentuan tersebut di atas Terbanding masih dapat menerbitkan SKPKB tanpa dibatasi hak eksekusi penetapan pajaknya karena kedaluarsa



sebagaimana tenggang kedaluarsa 10 tahun pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

27. *bahwa Majelis menilai sesuai dengan prinsip motivasi sebagaimana dimaksud dalam asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik untuk setiap keputusan (motiverings beginsel atau principle of motivation), Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan a quo telah memenuhi asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik bahwa atas keputusan administrasi tersebut telah mempunyai alasan yang jelas karena harus beralasan (must be motivated) dan motivasi harus benar dan terang (just and clear). Oleh karena Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku, maka dinilai dalam menggunakan wewenangnya untuk penyelnggaran suatu kepentingan umum tidak lain daripada yang dimaksud oleh peraturan dasarnya telah terpenuhi;*

TANGGAPAN:

1. bahwa pandangan Majelis mengenai adanya pertanggungjawaban pidana sebagaimana telah diputus oleh MA, masih ada tanggung jawab perpajakan yang belum diselesaikan merupakan pandangan yang keliru dan tidak mencerminkan kepastian hukum bagi wajib pajak yang telah dikenakan sanksi pidana perpajakan;
2. bahwa dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, disebutkan:

Apabila terhadap wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, untuk menentukan kerugian pada pendapatan negara, atas jumlah pajak yang terutang belum dikeluarkan surat ketetapan pajak;

Untuk mengetahui bahwa Wajib Pajak memang benar-benar melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, harus dibuktikan melalui proses pengadilan yang dapat membutuhkan waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Kemungkinan dapat terjadi bahwa Wajib Pajak yang disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tetapi oleh penuntut umum tidak dituntut berdasarkan sanksi pidana perpajakan, misalnya Wajib Pajak yang dijatuhi pidana oleh pengadilan karena melakukan penyelundupan yang



dalam putusan pengadilan tersebut menunjukkan adanya suatu jumlah objek pajak yang belum dikenai pajak;

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kembali pajak yang terutang tersebut, dalam hal Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar masih dibenarkan untuk diterbitkan, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar meskipun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampaui.”;

Dalam Penjelasan tersebut telah sejelas-jelasnya dijelaskan bahwa penerbitan SKPKB yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah ditujukan kepada tindak pidana perpajakan atau tindak pidana lainnya yang diajukan ke pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tidak dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) tersebut adalah sesuai dengan prinsip *Ultimum Remedium*;

Bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (5) telah menegaskan untuk perkara yang telah dituntut dengan sanksi pidana perpajakan tidak lagi dapat diterbitkan SKPKB, oleh karena itu penerbitan SKPKBT oleh Termohon Peninjauan kembali untuk menagih kembali utang pajak Pemohon Peninjauan Kembali merupakan suatu kekeliruan karena terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan penuntutan berdasarkan sanksi pidana perpajakan;

3. Bahwa prinsip Hukum Pidana sebagai *Ultimum Remedium*:

- a. *Ultimum Remedium* pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan:’... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh



tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*).”;

b. Van de Bunt mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu:

- Pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat;
- Kedua, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hukum lain, bahkan sering membawa dampak sampingan, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir);
- Ketiga Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasilah yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum pidana;

4. Bahwa rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

(1) *Setiap orang dengan sengaja:*

- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat kali) jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;*

Dengan demikian pengenaan pidana denda menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) tersebut harus mendasarkan terlebih dahulu kepada perhitungan pajak terutang sebagaimana menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 merupakan kewenangan Direktur



Jenderal Pajak, bukan kewenangan Mahkamah Agung dalam peradilan pidana;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dalam Putusan MA disebutkan sebagai potensi kerugian Negara yang dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian Negara sebagai denda pidana perpajakan, adalah merupakan bukti sempurna dan dinilai dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang masih harus dibayar menurut per Undang-Undang Perpajakan yang berlaku merupakan pertimbangan dan penilaian yang keliru karena seyogianya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU KUP tersebut perhitungan pajak terutang wajib dilakukan terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Pajak agar peradilan pidana dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai pedoman/acuan dalam menjatuhkan pidana denda;

Penghitungan besarnya utang pajak haruslah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) bukan ditentukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pidana. Yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukan penghitungan besarnya pajak terutang adalah Termohon Peninjauan Kembali melalui proses pemeriksaan pajak bukan institusi lainnya yang tidak memiliki keahlian pajak sebagaimana Mahkamah Agung dalam peradilan pidana. Penghitungan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut hanyalah merupakan penghitungan potensi kerugian negara bukan penghitungan utang pajak sehingga harus dihitung ulang oleh Termohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut:

5. Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakekatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui



penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;

6. *Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah atautah tidak? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;*
6. Bahwa sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan prematur sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST (Bukti P-07) sebagai berikut:
 1. *Mengabulkan eksepsi prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;*
 2. *Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena prematur tidak dapat diterima.”;*
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PID/2012/PT.DKI, dimana menurut hukum acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan Judex Facti yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan;
7. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan menurut fakta persidangan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang itu tidak dimanfaatkan oleh Pemohon karena terbukti



tidak menempuh jalan dengan melakukan tindakan penyelesaian secara hukum administratif terlebih dahulu merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya karena ke-14 perusahaan yang tergabung dalam AAG melalui PT Inti Indosawit Subur telah berulang kali menyurati Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal yang menyatakan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan yang ada dengan baik dan memohon agar diberikan kesempatan untuk melakukan pembahasan bersama dengan Direktur Jenderal Pajak jika ada pajak yang kurang atau belum dibayar. Namun itikad baik ke-14 perusahaan tersebut tidak mendapat tanggapan yang baik dari Direktur Jenderal Pajak;

8. Bahwa Hukum menghendaki penyelesaian suatu permasalahan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga mencerminkan penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan semua pihak namun pihak Terbanding yang sejak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan Putusan MA dalam perkara Suwir Laut tidak pernah memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jumlah pajak terutang yang kurang atau belum dibayar. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Suwir Laut yang tidak ada mencantumkan jumlah pajak terutang yang kurang atau belum dibayar;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan pada asas "*insingular*", teori "melebur" dan asas "kumulatif internal" dan "kumulatif eksternal", tanpa mendasarkan kepada asas "legalitas" merupakan pertimbangan yang keliru karena dalam UU KUP tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur penegakan sanksi pidana dapat bersama-sama dengan penegakan sanksi administrative atau jika terdapat sanksi pidana juga ada sanksi lainnya maka penegakan hukum dapat dilakukan bersama-sama. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara tegas mengatur selain pidana dan dikenakan sanksi lain sebagaimana diatur di Pasal 119 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut:

"Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;*



- b. *Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;*
- c. *Perbaikan akibat tindak pidana;*
- d. *Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau*
- e. *Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;*

10 Bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan aparaturnegara wajib berdasarkan atas hukum sesuai prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas termasuk juga dalam hal mengenakan sanksi baik pidana maupun administratif terhadap suatu perbuatan. Undang-undang yang baik adalah undang-undang yang jelas *Lex Certa* dan *Lex Scripta*;

11 Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi tidak ada satu ketentuan pun yang memberikan pengaturan khusus mengenai penerbitan SKPKB yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan, oleh karena itu *mutatis mutandis* penerbitan SKPKB berdasarkan putusan pengadilan wajib mengikuti tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, tidak ada pengecualian;

13. Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbadning) tidak terdapat adanya perincian pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitungan pajak terutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 31 UU KUP, dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 17/PMK.03/2013 dan Pasal 1 angka 16 dan 17 UU KUP untuk SKP melalui proses pemeriksaan, di dalam SKP hanya tercantum satu angka sebagai Pajak kurang dibayar;

14. Bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi mengatur bahwa "*Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. *Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;*
- b. *Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan*



Verifikasi;

- c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
- d. Petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- f. Dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- h. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



- j. *Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;*
- k. *Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*
- l. *Hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi; dan*
- m. *Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.”;*

15. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, jelas bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan:

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima Surat Tugas Nomor ST-548/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 19 April 2013;
- Pada tanggal 14 Mei 2013, KPP Madya Jakarta Pusat menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Nomor S-7081/WPJ.06/KP.12/2013;

Dalam jangka waktu yang sangat singkat tersebut, pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanpa meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dilanjutkan dengan Berita Acara Pembahasan Akhir dimana tidak pernah dilakukan diskusi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam proses Pembahasan Akhir;

Bahwa dengan demikian, maka kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selaku Pemeriksa Pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terpenuhi, sehingga hasil pemeriksaan tidak transparan;

16. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menerbitkan SKPKB berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU KUP merupakan pendapat yang bertentangan dengan prinsip *Ultimum Remedium*, Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

IX. Kesimpulan

1. Bahwa Putusan MA RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tidak dapat digunakan sebagai alasan dasar koreksi dalam penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU KUP dikarenakan putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi pidana dan bersifat *ultimum remedium*;
2. Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya jenis pelanggaran administrasi terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak telah mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat melaksanakan haknya untuk melakukan upaya pembelaan berupa pembuktian ketidakbenaran dugaan pelanggaran administrasi perpajakan yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sehingga, hal ini telah menyebabkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. Bahwa Putusan MA RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak menyebutkan bukti pendukung yang menunjukkan adanya pelanggaran administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga tidak dapat menentukan jenis pelanggaran administrasi terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak. Dengan demikian



koreksi Termohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) tidak berdasarkan bukti sehingga seharusnya dibatalkan;

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.61342/PP/M.XVIA/13/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2002 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 atas nama: PT Indo Sepadan Jaya, NPWP 01.221.933.3-073.000, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2, Kebon Melati Jakarta Pusat 10230;

adalah tidak benar sama sekali serta telah secara nyata bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi kami, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku Wajib Pajak;

5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKPKB dan SKPKBT tanpa melalui proses pemeriksaan/verifikasi maupun analisa lebih lanjut padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah secara nyata menggunakan UU KUP sebagai dasar untuk penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan Surat perintah Verifikasi, dan menyatakan bahwa Putusan MA hanya sebagai data lain maka sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (5) ini di mana SKPKB dan SKPKBT diterbitkan tidak melalui proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP;
6. Bahwa Dasar penerbitan SKPKB yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah atas dasar Pasal 13 ayat (5) UU KUP dan semua ketentuan pelaksanaannya namun besarnya pajak kurang dibayar diambil hanya berdasarkan Putusan MA tanpa melakukan prosedur pemeriksaan yang benar sesuai UU KUP dan tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari perhitungan pajak itu sendiri adalah tidak sesuai karena sanksi pidana dan denda pada Putusan MA bersifat *ultimum remedium* dimana seharusnya tidak sanksi lain lagi yang dapat ditagih setelah sanksi pidana dan denda ini;



7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam mengeluarkan SKPKB hanyalah didasarkan pada putusan pidana Kasasi Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir laut yang hanyalah merupakan tax manager, di dalam putusan kasasi tersebut tidak ada amar putusan yang menyatakan menghukum PT Indo Sepadan Jaya bahkan di dalam pertimbangan putusan pidana kasasi tersebut tidak ada penghitungan-penghitungan mengenai nilai pokok pajak terutang namun langsung menentukan denda pajak yang apabila tidak dibayarkan hanya akan mengakibatkan Terdakwa Suwir Laut harus menjalani hukumannya;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) selalu mengatakan dan menekankan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SKP sesuai dengan UU KUP dan peraturan pelaksanaannya tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan proses pemeriksaan maupun verifikasi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pun tidak melakukan analisa terhadap kebenaran dari pajak kurang dibayar yang ditagihkan kepada korporasi melalui SKPKB dan SKPKBT dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan bahwa SKP *a quo* yang diterbitkan ini bukanlah SKP biasa;
9. Bahwa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak ada peraturan khusus baik di dalam UU KUP, Undang-Undang Pengadilan Pajak maupun semua peraturan pelaksanaannya yang memperbolehkan proses penerbitan SKP tanpa melaksanakan proses pemeriksaan/verifikasi sebagaimana mestinya. Tidak ada pula ketentuan penerbitan SKP yang membedakan antara SKP hasil pemeriksaan biasa dengan SKP yang diterbitkan berdasarkan keterangan lainnya. Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sudah memohon agar ditunjukkan dasar hukumnya apabila ada namun di dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sanggup menghadirkan dasar hukum yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) gunakan;
Bahwa pendapat yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mencerminkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas *fair play*, asas kepastian hukum dan asas larangan "*detournement de procedure*";



10. Bahwa penghitungan utang pokok pajak haruslah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) bukan ditentukan oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini sedang mengadili suatu perkara pidana. Penghitungan denda pajak yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara pidana tersebut hanyalah merupakan penghitungan potensi kerugian negara, bukan penghitungan utang pokok pajak yang seharusnya dikeluarkan dalam bentuk SKPKB/SKPKBT yang merupakan hak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan SKPKB/SKPKBT yang kemudian akan digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) sebagai dasar untuk mengajukan keberatan dan Banding sesuai peraturan dan prosedur yang telah diatur dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;
11. Bahwa Berdasarkan Amar Putusan MA tersebut dalam halaman 473-678, dimana tidak ada satu diktum/amar pun yang memerintahkan DJP untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada 14 korporasi, dengan demikian penerbitan SKPKB/SKPKBT yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampaui wewenang dari Putusan MA dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
12. Bahwa Berdasarkan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Hal ini sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bukan dan tidak bisa bertindak sebagai pelaksana maupun eksekutor dari Putusan MA baik secara langsung maupun tidak langsung;
13. Bahwa Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalah putusan pidana untuk individu yang bukan bertindak atas nama dan bukan direksi, dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah didakwa, tidak pernah diadili, tidak memiliki hak untuk membela diri di dalam persidangan individu tersebut sehingga Putusan MA tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai penerbitan SKPKB dan/atau SKPKBT terhadap 14 korporasi. Hal ini telah diperkuat dengan adanya Amar pertimbangan Majelis Hakim MA di halaman 472 Putusan MA, Pasal 12 PP Nomor 74 Tahun 2011, Pendapat Hukum dari Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, dan yang telah



disampaikan oleh beliau di dalam beberapa persidangan di pengadilan pajak sebagai Ahli yang telah disumpah pada tanggal 8 September 2014 di Majelis I, tanggal 22 September 2014 di Majelis V B, dan tanggal 7 Oktober 2014 di Majelis VI A, Dr. Wirawan B.Ilyas, Ak., M.Si., S.H., M.H., CPA, CA dalam jurnal Nomor 42 tanggal 3 Juli 2013 Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan kajian beliau yang berjudul Kajian Ilmiah Pemeriksaan Pajak Terhadap Asian Agri Group tanggal 5 Mei 2014, Dr. (Jur) Arbijoto, M.Fil, M.B.L., M.H., S.H., S.S. melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014;

14. Bahwa Putusan MA Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 merupakan putusan yang melanggar hukum acara pidana sehingga merupakan putusan yang batal demi hukum, bukan merupakan bukti yang sempurna (*probatio plena*);
15. Bahwa walaupun Putusan MA Republik Indonesia Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dalam perkara Suwir Laut merupakan putusan yang terdapat kekhilafan dan kekeliruan nyata, dengan tidak mengurangi kewajiban konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A UUD 1945 Amandemen Kedua, PT Indo Sepadan Jaya dengan itikad baik dan patuh kepada hukum telah melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, sehingga pajak yang kurang dibayar yang menimbulkan kerugian penerimaan negara telah dibebankan dan telah dilaksanakan pembayarannya. Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pidanaan yaitu selain selain *Retribution* (pembalasan, *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadap hukum administrasi yang



meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*);

16. Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusan atas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana dan denda. Lebih lanjut bahwa Wajib Pajak yang dimaksudkan oleh Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang KUP adalah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana yang sudah diakui oleh Majelis Hakim MA bukan merupakan Terdakwa. Sehingga penerbitan SKP oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ini cacat hukum dan harus dibatalkan;
17. Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaran perhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutama setelah di dalam persidangan sudah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa mereka tidak tahu asal usul perhitungan tersebut;
18. Bahwa sejak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi, pos-pos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksi administrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apa yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memberikan selain hanya mengatakan bahwa koreksi dilakukan berdasarkan Putusan MA, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun melakukan permohonan secara resmi kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebanyak dua kali setelah SKP diterbitkan dan sekali lagi pada saat Keputusan Keberatan diterbitkan, namun



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mendapatkan jawaban bahwa SKP diterbitkan berdasarkan Putusan MA tanpa memberikan perincian koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Wajib Pajak. Hal ini jelas melanggar Pasal 31 UU KUP dan peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 1 angka 3 dan 4 PMK Nomor 146/PMK.03/2012;

19. Bahwa berdasarkan Surat Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kutip di atas dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan ke Pengadilan Pajak dan pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertanyakan substansi permasalahan berupa kebenaran angka pajak kurang dibayar berikut dengan perincian koreksi, pos-pos yang dikoreksi, alasan dasar koreksi, perincian perhitungan pajak terutang dan pajak kurang dibayar berikut dengan sanksi administrasinya, dan oleh karena di dalam proses pemeriksaan maupun verifikasinya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak mengungkapkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menyampaikan di dalam Surat Permohonan Keberatan dan Surat Permohonan Banding masalah prosedur penerbitan SKP itu sendiri. Sudah jelas bahwa di dalam SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengandung nilai sengketa pajak yang masih Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pertanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Pengadilan Pajak ini;

20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat meyakini keabsahan penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 secara formal dan materi/substansi nilai sengketa pajak sehingga SKPKB dengan Nomor tersebut berikut dengan KEP-1623/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013 adalah Cacat Hukum dan harus batal demi hukum dikarenakan:

- a. Ketidakjelasan dasar penetapan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);



- b. Tidak terdapat pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari saksi administrasi yang menjadi syarat utama diterbitkannya SPHP/SPHV dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pajak maupun Verifikasi;
- c. Hanya mencantumkan jumlah pajak kurang dibayar beserta sanksi administrasi saja tanpa adanya kebenaran penghitungan pajak dan asal usulnya;
- d. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menerbitkan SKPKB *a quo* tanpa memperhatikan prosedur tata cara verifikasi maupun pemeriksaan pajak yang berlaku;
- e. Hilangnya hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan pengkreditan pajak, baik dalam pemotongan maupun pemungutan yang telah dipotong dan disetor;

Bahwa demi memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat di Mahkamah Agung dapat memproses Permohonan Banding dari sisi formalitas penerbitan SKP ini sendiri (kekeliruan prosedur yang telah diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di dalam persidangan) dan secara substansi mengenai nilai sengketa pajak yang tidak diketahui asalnya dan perinciannya;

21. UU KUP tidak menganut adanya doktrin "*respondeat superior*" atau "*Vicarious Liability*". Sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak bisa menggunakan doktrin tersebut di dalam penerbitan SKPKB maupun Keputusan Keberatan. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga mengakui hal ini yang dapat kita lihat dalam Keputusan Keberatan yang sama sekali tidak ada menggunakan doktrin ini sebagai pertimbangan dalam penolakan terhadap Keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Keputusan Keberatan diproses dan diterbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP. Hal ini telah dipertegas oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Bukti P-04) dan Dr. Margarito S.H., M.Hum. (Bukti P-09) dalam kajian hukumnya dan di dalam pendapatnya yang di sampaikan selama persidangan di Pengadilan Pajak;



22. Di tingkat Pengadilan Negeri selaku *Judex Facti* dalam perkara Suwir Laut sudah sangat jelas tidak pernah ada pembahasan, pemeriksaan maupun pengujian mengenai besarnya pajak terutang dan pajak kurang dibayar sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, halaman 587 dan 588 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada hakikatnya merupakan kerugian pada pendapatan negara. Artinya, untuk melakukan perhitungan kerugian pada pendapatan negara harus diketahui, dihitung dan/atau ditetapkan terlebih dahulu berapa pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut oleh Fiskus melalui penerbitan SKP, dan ini berarti mekanisme administrasi perpajakan yang harus ditempuh duluan;
- 2) Dalam perkara pidana pajak, perhitungan yang dilakukan Fiskus (DJP) yang bukan dalam bentuk ketetapan melainkan hanya perhitungan belaka, tidak dapat digunakan untuk menetapkan besarnya kerugian pada pendapatan negara karena Jaksa/Penuntut Umum dan/atau Hakim Pidana tidak mesti menerima secara serta merta hasil perhitungan DJP melainkan harus ada penilaian atau pengujian apakah perhitungan DJP itu didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan/atau sah ataukah tidak? Apalagi hasil perhitungan DJP itu tidak bisa diajukan keberatan dan harus diterima tanpa ada alternatif lain, yang pada gilirannya hasil perhitungan itu menjadi dasar untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dengan demikian perhitungan itu menjadi patokan pula dalam menetapkan besarnya pidana denda pada Pasal 19 ayat (1) huruf c UU KUP 2000, maka dalam hal seperti ini seharusnya jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut ditetapkan dan disahkan dengan SKP, sebab tujuan akhir dari pemeriksaan pajak adalah untuk menghitung kembali jumlah pajak yang terutang pada Wajib Pajak dan menuangkannya dalam surat ketetapan pajak (SKP) dapat berupa: SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 241/PID/2012/PT.DKI, di mana menurut hukum



acara yang berlaku kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Facti* yang memeriksa fakta-fakta hukum yang diungkapkan di persidangan;

23. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya. Dengan demikian kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang kurang dibayar oleh undang-undang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak bukan kepada Majelis Hakim dalam peradilan pidana;
24. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya dan bukti-bukti hukum maupun proses pemeriksaan pajak dan atau verifikasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melanggar Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya sehingga SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/02/073/13 tanggal 23 Mei 2013 Tahun Pajak 2002 yang diterbitkan seharusnya dinyatakan keliru sehingga harus dibatalkan. Dengan demikian maka Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 otomatis keliru dan harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Menolak" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013, tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2002, Nomor 00004/204/02/073/13, tanggal 23 Mei 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.221.933.3-073.000, adalah



secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dengan mengambilalih pertimbangan hukum dalam Majelis lainnya pada Pengadilan Pajak, salah satu Anggota Majelis Pengadilan Pajak, yaitu Saudara Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.LM berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dan Majelis Hakim Agung membenarkan pendapat tersebut, karena Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah menjalani seluruh hukuman, yang dalam kedudukan hukum yang tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan di bawah naungan AAG/Asian Agri Group telah melaksanakan dan merealisasikan dari amar putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.5US/2012, tanggal 18 Januari 2012, di antaranya yang diputus:
 1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut" dan kepadanya dijatuhi hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar. Hukuman Pidana yang dijatuhkan tersebut karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 2. Bahwa Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) atas dasar kemauan sendiri dan didorong keinginan luhur diikuti dengan menunjukkan iktikad baik sebagai warga negara dalam melaksanakan bagian dari hak dan kewajiban konstitusi (*Vide* Pasal 23A UUD Negara RI 1945 Pasca Amandemen) telah melaksanakan pembayaran melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.5US/2012, tanggal 18



Januari 2012, dengan hukuman denda sebesar 200% atas Potensi Kerugian Negara yaitu sebesar Rp2.519.955.391.304,00 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat Rupiah) atau ekuivalen 200% dari pajak yang seharusnya dibayar Suwir Laut, alias Liu Che Sui, alias Atak, yang mewakili dan tergabung dalam 14 (empat belas) perusahaan di bawah naungan AAG/Asian Agri Group, telah dibayar lunas dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui pentahapan sebanyak 9 (sembilan) angsuran melalui Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai secara berturut-turut pada tanggal 29 Januari 2014 hingga sampai tanggal 1 September 2014, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Puji Priliyanto, S.E., NIP 19730403.200501.1.008, selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya disetor pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung PELNI sebagai penerimaan Kejaksaan untuk MAP (Mata Anggaran Penerimaan) Kejaksaan: 423414, Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) pada KPKN 139 Jakarta V. Dengan demikian, potensi kerugian Negara dalam perkara *a quo* telah dihitung melalui penjatuhan hukuman pidana berupa denda 200% dari kewajiban pembayaran perpajakan (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka kerugian keuangan pada dasarnya adalah hilangnya semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak tersebut), oleh karena telah dipenuhi kewajiban hukum dimaksud dan telah dilakukan penyetorannya, sehingga dapat menggugurkan kewajiban-kewajiban lainnya di bidang perpajakan dalam perkara *a quo* dan telah dilakukan secara final. Lagi pula dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) bukan sebagai terpidana, namun secara tersirat semata-mata merupakan tanggungjawab renteng yang bersifat tidak langsung atas pembayarannya sehubungan dengan amanat konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Negara RI 1945 (Pasca Amandemen) *juncto* Pasal 32 UU KUP;

3. Bahwa Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendalilkan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP adalah tidak dapat dibenarkan, karena penerapan sanksi pidana perpajakan merupakan upaya penegakan hukum terakhir (*Ultimum Remedium*) yang sebelumnya diawali dari serangkaian kegiatan penyidikan pajak hingga berkas dinyatakan lengkap (P-21), berikut dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada akhirnya menghasilkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);

Di samping itu, *Ultimum Remedium* dalam perkara *a quo* dilatarbelakangi adanya perpindahan peralihan kewenangan atau kompetensi untuk memeriksa dan mengadili dari Peradilan Administrasi ke Peradilan umum, yaitu bahwa sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat dari pemenuhan kewajiban pembayaran bersifat *depend* terhadap hukum administrasi yang meletakkan prinsip *administration penal law* merupakan kebijakan perpajakan bersifat sebagai *ultimum remedium*. Oleh karenanya penerbitan SKPKB/SKPKBT *a quo* oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) merupakan perbuatan yang tidak terukur, baik secara prosedural maupun secara substansial yang pada gilirannya merupakan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melakukan eksekusi untuk kedua kalinya, setelah eksekusi pertama dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh sebab itu, Keputusan Terbanding Nomor KEP-1623/WPJ.06/2013, tanggal 31 Oktober 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2002, Nomor 00004/204/02/073/13, tanggal 23 Mei 2013, harus dibatalkan karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat pula bahwa tujuan hukum perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, adalah menegakkan fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* secara *equilibrium* yaitu mengedepankan pengisian pundi-pundi keuangan negara melalui APBN dalam rangka menyejahterakan rakyat dan meletakkan kepastian hukum yang bersendikan keadilan dalam mewujudkan kewajiban membayar pajaknya dengan benar. Hal ini juga didasari pada suatu pandangan hukum di bidang perpajakan

Halaman 125 dari 129 halaman. Putusan Nomor 1236/B/PPK/PJK/2015



yang berlaku dewasa ini di berbagai negara di antaranya (*OECD Committee of Fiscal Affairs - Forum on Tax Administration*);

The concept of protection of taxpayers' rights is a function of the broader notion of human rights. Human rights seek to protect individuals especially against the exercise of public power. Taxation, on the other hand, is arguably the most visible, persistent and almost universal interference with ownership. The right to protection, or peaceful enjoyment, of one's possessions is well-known human right. Furthermore, taxation generally and tax administration in particular, provide fertile ground for conflict between the exercise of public power, on the one hand, and the need to respect the rights of individual (including corporate) taxpayer on the other hand;

(Terjemahan bebas: Konsep perlindungan hak-hak wajib pajak merupakan salah satu fungsi dalam lingkup konsep hak asasi manusia Hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada individu-individu khususnya terhadap pelaksanaan kewenangan publik/pemerintah. Perpajakan, di lain pihak, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang paling kasat mata, paling dipaksakan dan hampir bersifat universal. Hak untuk mendapatkan perlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apa yang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui. Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya, menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenang pemerintahan di satu pihak, dengan perlunya menghormati hak-hak individual wajib pajak (termasuk korporasi) di pihak lain;

(Lihat: Kofler, Georg. Et.al, *Human Rights and Taxation in Europe and the World*, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);

Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D. Miethe dan Hong Lu (2005) yaitu tujuan pemidanaan yaitu selain *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), *Incapacitation* (penahanan dan pengasingan), *Rehabilitation* (pengintegrasian kembali kepada



masyarakat). Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005), bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatan juga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan. Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (*deterrence aspect*) dan dalam upaya untuk meningkatkan *shock therapy* serta aspek pendidikan (*education aspect*), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hak-hak dan kewajiban hukum di bidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (*budgetair function*), dan oleh karenanya Keputusan Tergugat yang mendalilkan Pasal 2 huruf e UU PTUN harus dibatalkan, karena UU PTUN bersifat *lex generalis* sedangkan Undang-Undang Perpajakan bersifat *lex specialis* sehingga apabila penerbitan SKPKB/SKPKBT merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 huruf e UU PTUN adalah bertentangan dengan kompetensi peradilan, karena sengketa *a quo* berkaitan sengketa mengenai besarnya pajak yang terutang yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak sebagai Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara [Vide Pasal 9A UU PTUN *juncto* Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman], sedangkan Pemohon Banding telah melakukan pertanggungjawaban dalam hukum publik yaitu dengan melaksanakan kewajiban pembayaran “Lunas” atas hukuman, berupa kewajiban membayar pajaknya dan menjalani hukuman lainnya. Lagi pula penerbitan keputusan *a quo* tidak melalui suatu prosedur pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;

- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDO SEPADAN JAYA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61342/PP/M.XVI.A/13/2015, tanggal 06 Mei 2015, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. INDO SEPADAN JAYA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-61342/PP/M.XVI.A/13/2015, tanggal 06 Mei 2015;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT. INDO SEPADAN JAYA**, tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya

Halaman 128 dari 129 halaman. Putusan Nomor 1236/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)